



PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG

2024

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

LPPD



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan laporan ini merupakan wujud pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Laporan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, sebagai bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran serta masyarakat. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Tabalong.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Tabalong, DPRD, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sepanjang tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi peningkatan kinerja pemerintahan daerah di masa mendatang. Semoga dengan laporan ini, kita dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tabalong yang lebih maju dan sejahtera.

Tanjung, 2025

BUPATI TABALONG



Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., M.T.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	I-1
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	I-1
b. Data Geografis Wilayah	I-1
c. Informasi Umum Data Kependudukan	I-3
d. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.....	I-4
e. Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	I-5
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I-6
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah).....	I-10
h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.....	I-19
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	I-26
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	I-26
b. Visi Dan Misi Kepala Daerah	I-27

c.	Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	I-28
d.	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	I-32
1.1.3	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	I-34

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

	DAERAH	II-1
2.1	Capaian Kinerja Makro	II-1
2.2	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	II-1
2.1.1	Indikator Kinerja Kunci Hasil	II-1
2.1.2	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-8
2.3	Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	II-9
a.	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	II-9
b.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja	II-10
c.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	II-12
d.	Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II-14
e.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II-16
f.	Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	II-23

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III-1

3.1	Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	III-1
3.1.1	Target Kinerja	III-1
3.1.2	Realisasi	III-1
3.2	Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	III-2
3.2.1	Target Kinerja	III-2

3.2.2	Realisasi	III-2
3.3	Permasalahan dan Kendala	III-2
3.4	Saran dan Tindak Lanjut	III-2
BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN	
	MINIMAL	IV-1
4.1	Urusan Pendidikan	IV-1
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-1
4.1.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-1
4.1.3	Realisasi	IV-4
4.1.4	Alokasi Anggaran	IV-7
4.1.5	Dukungan Personil	IV-7
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	IV-9
4.2	Urusan Kesehatan	IV-10
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-10
4.2.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-10
4.2.3	Realisasi	IV-12
4.2.4	Alokasi Anggaran	IV-14
4.2.5	Dukungan Personil	IV-14
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	IV-15
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	IV-16
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-16
4.3.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-17
4.3.3	Realisasi	IV-17
4.3.4	Alokasi Anggaran	IV-24
4.3.5	Dukungan Personil	IV-25
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	IV-25
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	IV-25
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	IV-25
4.4.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh	

	Daerah	IV-26
4.4.3	Realisasi	IV-26
4.4.4	Alokasi Anggaran.....	IV-27
4.4.5	Dukungan Personil.....	IV-27
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-28
4.5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-28
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-28
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-29
4.5.3	Realisasi	IV-34
4.5.4	Alokasi Anggaran.....	IV-39
4.5.5	Dukungan Personil.....	IV-40
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-41
4.6	Urusan Sosial	IV-42
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	IV-42
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	IV-42
4.6.3	Realisasi	IV-43
4.6.4	Alokasi Anggaran.....	IV-45
4.6.5	Dukungan Personil.....	IV-46
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	IV-47
4.7	Program dan Kegiatan.....	IV-47
4.7.1	Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan	IV-47
4.7.2	Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan	IV-50
4.7.3	Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	IV-50
4.7.4	Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat.....	IV-53
4.7.5	Program dan Kegiatan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	IV-54
4.7.6	Program dan Kegiatan Urusan Sosial	IV-55
BAB V	PENUTUP.....	V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2024).....	I-3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2020-2024).....	I-4
Tabel 1.3	Tingkat Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2020-2024)	I-4
Tabel 1.4	Luas Wilayah, Persentase, dan Jumlah Kelurahan/Desa per Kecamatan di Kabupaten Tabalong	I-5
Tabel 1.5	Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Beserta Dasar Hukumnya	I-5
Tabel 1.6	Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang (2024	I-7
Tabel 1.7	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024	I-10
Tabel 1.8	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2024.....	I-18
Tabel 1.9	Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2024	I-19
Tabel 1.10	Strategi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Berdasarkan Visi dan Misi	I-28
Tabel 1.11	Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong.....	I-32
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Makro Kabupaten Tabalong (2023-2024).....	II-1
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintahan.....	II-2
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Fungsi Penunjang.....	II-8
Tabel 2.4	Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	II-10
Tabel 2.5	Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Terhadap Target	

	Tahun 2024	II-10
Tabel 2.6	Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	II-12
Tabel 2.7	Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD	II-14
Tabel 2.8	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di Masyarakat	II-16
Tabel 2.9	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan	II-17
Tabel 2.10	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten	II-18
Tabel 2.11	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	II-18
Tabel 2.12	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum	II-19
Tabel 2.13	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	II-19
Tabel 2.14	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan	II-19
Tabel 2.15	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi	II-20
Tabel 2.16	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Terkendalinya ketimpangan Pendapatan	II-20
Tabel 2.17	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Budaya Serta Penerapan IPTEK	

	Secara Optimal.....	II-21
Tabel 2.18	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal	II-21
Tabel 2.19	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial	II-21
Tabel 2.20	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	II-22
Tabel 2.21	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Menurunnya Tingkat Kemiskinan.....	II-22
Tabel 2.22	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik.....	II-23
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong	III-2
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Tabalong	III-3
Tabel 4.1	Target Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan PAUD	IV-1
Tabel 4.2	Target Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar	IV-1
Tabel 4.3	Target Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan.....	IV-2
Tabel 4.4	Target Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-2
Tabel 4.5	Target Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-2
Tabel 4.6	Target Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	IV-3
Tabel 4.7	Target Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan Kualifikasi S1/D4.....	IV-3

Tabel 4.8	Target Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	IV-3
Tabel 4.9	Target Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan	IV-4
Tabel 4.10	Target Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan	IV-4
Tabel 4.11	Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun pada Pendidikan PAUD	IV-4
Tabel 4.12	Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun pada Pendidikan Dasar	IV-5
Tabel 4.13	Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabalong	IV-5
Tabel 4.14	Capaian Skor Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-5
Tabel 4.15	Capaian Skor Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-5
Tabel 4.16	Realisasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	IV-6
Tabel 4.17	Realisasi Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	IV-6
Tabel 4.18	Capaian Skor Indeks Iklim Keamanan Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-6
Tabel 4.19	Capaian Skor Indeks Iklim Kebinekaan Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-6
Tabel 4.20	Capaian Skor Indeks Iklim Inklusivitas Berdasarkan Asesmen Nasional	IV-6
Tabel 4.21	Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan APBD-P TA. 2024	IV-7
Tabel 4.22	Total APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-7
Tabel 4.23	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Golongan	IV-7
Tabel 4.24	Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Pendidikan	IV-8
Tabel 4.25	Persentase Guru TK yang Memenuhi kualifikasi S1/D.IV Tahun 2023/2024	IV-8
Tabel 4.26	Persentase Guru SD/MI yang Memenuhi kualifikasi S1/D.IV Tahun 2023/2024	IV-8

Tabel 4.27	Persentase Guru SMP/MTs yang Memenuhi kualifikasi S1/D.IV Tahun 2023/2024.....	IV-9
Tabel 4.28	Target Capaian Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-11
Tabel 4.29	Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan	IV-12
Tabel 4.30	Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	IV-13
Tabel 4.31	Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	IV-14
Tabel 4.32	Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	IV-15
Tabel 4.33	Target Capaian untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum 2024.....	IV-17
Tabel 4.34	Capaian Layanan Air Minum.....	IV-17
Tabel 4.35	Capaian Layanan Air Limbah Domestik.....	IV-19
Tabel 4.36	Rekapitulasi Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah Domestik.....	IV-21
Tabel 4.37	Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024	IV-24
Tabel 4.38	Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	IV-26
Tabel 4.39	Batas Waktu Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV-26
Tabel 4.40	Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024.....	IV-26
Tabel 4.41	Alokasi Anggaran Kegiatan Terkait SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.42	Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kepangkatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.43	Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan	

	Permukiman Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-27
Tabel 4.44	Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	IV-29
Tabel 4.45	Target Pelayanan Informasi Rawan Bencana.....	IV-30
Tabel 4.46	Target Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.....	IV-30
Tabel 4.47	Target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	IV-32
Tabel 4.48	Capaian SPM 2024 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.....	IV-34
Tabel 4.49	Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024	IV-36
Tabel 4.50	Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024	IV-36
Tabel 4.51	Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.....	IV-38
Tabel 4.52	Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.....	IV-39
Tabel 4.53	Anggaran dan Realisasi Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024	IV-39
Tabel 4.54	Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-40
Tabel 4.55	Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024.....	IV-41
Tabel 4.56	Permasalahan dan Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-41
Tabel 4.57	Pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabalong.....	IV-43
Tabel 4.58	Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	IV-45
Tabel 4.59	Data Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	IV-46
Tabel 4.60	Realisasi Program Kegiatan Penunjang SPM Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2024.....	IV-47
Tabel 4.61	Realisasi Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok	

	Air Minum Sehari-hari Tahun 2024.....	IV-50
Tabel 4.62	Realisasi Pelayanan Dasar Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-52
Tabel 4.63	Program dan Kegiatan Penerapan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024	IV-53
Tabel 4.64	Program, Kegiatan, Target dan Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar.....	IV-55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah;

Kabupaten Tabalong terbentuk secara sah dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756). Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Tanggal 14 juni 1965, yang mendorong daerah persiapan Tingkat II Tabalong ditingkatkan lagi menjadi Daerah Otonomi Tingkat II Tabalong yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah, yang menjalankan roda Pemerintahan sendiri baik eksekutif maupun Legislatif.

b. Data Geografis Wilayah;

Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung berada di wilayah utara Provinsi Kalimantan Selatan, secara geografis terletak antara 115°9' - 115°47' Bujur Timur dan 1°18' - 2°25' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah timur : Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah barat : Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Tabalong memiliki luas wilayah sebesar 347.677,93 ha, yang terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Kabupaten ini terletak strategis dalam jalur “segitiga emas” yang menghubungkan tiga provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, memberikan akses yang baik dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan regional.

Wilayah Kabupaten Tabalong memiliki karakteristik topografi yang beragam. Bagian utara dari Kabupaten Tabalong berupa dataran tinggi dan bergunung-gunung dengan Pegunungan Meratus yang membentang dari utara ke selatan di bagian timur. Pegunungan ini membentuk pemandangan alam yang indah dan memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan sumber daya alam. Di bagian tengah wilayah, terdapat dataran yang bergelombang, yang berpotensi untuk pertanian dan perkebunan. Sementara itu, bagian selatan wilayah Kabupaten Tabalong didominasi oleh dataran rendah dan rawa, yang cocok untuk pengembangan pertanian lahan basah dan sektor perikanan.

Kabupaten Tabalong memiliki iklim tropis dengan musim hujan yang berlangsung dari Oktober hingga April dan musim kemarau yang terjadi antara Mei hingga September. Suhu udara pada musim kemarau berkisar antara 31°C hingga 37°C, sementara pada musim hujan, suhu udara berkisar antara 25°C hingga 30°C. Rata-rata curah hujan tahunan di Kabupaten Tabalong berada pada kisaran 2.000 hingga 3.000 mm, mendukung pertumbuhan tanaman tropis yang melimpah di sebagian besar wilayahnya.

Jenis tanah yang dominan di Kabupaten Tabalong adalah Podsolik merah kuning, yang mencakup sekitar 43,17% dari total luas wilayah. Tanah ini sangat cocok untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan, dan kehutanan berbasis agroforestri, meskipun memiliki kekurangan dalam hal kesuburan yang dapat berkurang akibat erosi dan pencucian. Tanah dengan tipe ini umumnya membutuhkan pengelolaan yang hati-hati agar dapat mempertahankan kualitasnya, terutama dalam menjaga keseimbangan unsur hara.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Tabalong (97,8%) memiliki kedalaman tanah lebih dari 90 cm, yang ideal untuk pertanian. Tanah di wilayah ini memiliki tekstur halus, mendukung drainase yang baik, dan sekitar 95,51% wilayah tidak pernah tergenang. Hanya 2,14% wilayah yang tergenang secara periodik, sementara 2,35% tergenang terus-menerus, yang lebih cocok untuk kegiatan perikanan dan sawah.

Wilayah Kabupaten Tabalong memiliki ketinggian yang bervariasi. Sebagian besar wilayah dengan ketinggian 25-100 m dpl, mencakup 156.282 ha atau sekitar 43,5% dari total luas wilayah. Wilayah ini sangat cocok untuk pertanian tropis dan perkebunan. Sementara itu, wilayah dengan ketinggian di atas 1.000 m dpl merupakan yang paling kecil, hanya mencakup 2.923 ha atau sekitar 0,80% dari total wilayah, yang sebagian besar digunakan sebagai kawasan lindung. Sebaran ketinggian lainnya adalah 0-7 m dpl (7.062 ha atau 1,92%), 7-25 m dpl (11.688 ha atau 3,18%), 100-500 m dpl (82.277 ha atau 22,39%), dan 500-1.000 m dpl (107.233 ha atau 29,18%).

Kabupaten Tabalong memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian dan kehutanan. Sebanyak 25,77% dari total luas wilayah (sekitar 94.703 ha) dapat dimanfaatkan untuk budidaya lahan basah seperti perkebunan dan sawah, sementara 62.836 ha cocok untuk budidaya tanaman pangan lahan kering. Perkebunan menjadi salah satu sektor utama dengan area seluas 90.762 ha yang cocok untuk tanaman seperti kelapa sawit, karet, dan lainnya. Wilayah hutan terdiri dari 37.590 ha untuk hutan produksi dan 46.750 ha untuk hutan lindung, yang berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam.

Tanah di Kabupaten Tabalong umumnya bertekstur halus dan memiliki kemampuan drainase yang sangat baik. Sebanyak 98,75% wilayah memiliki tanah bertekstur halus, yang ideal untuk pertanian. Dalam hal pengelolaan lahan, sekitar 41,55% dari total wilayah (147.156 ha) telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti perkebunan, kebun rakyat, ladang, kolam, dan pemukiman. Namun, sekitar 58,45% wilayah lainnya (206.968 ha) masih belum dimanfaatkan dan terdiri dari hutan negara, padang rumput, rawa, serta lahan terlantar, yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Wilayah yang belum dimanfaatkan ini dapat menjadi sasaran untuk pengembangan pertanian dan kehutanan yang lebih intensif.

Kabupaten Tabalong dibagi menjadi enam kategori WTU berdasarkan kondisi geomorfologi dan ketinggian tempat. Di antaranya, WTU terbatas I (ketinggian <7 m dpl) cocok untuk perikanan dan persawahan; WTU utama Ia dan Ib (ketinggian 7-25 m dpl) cocok untuk perikanan dan sawah; WTU utama Ic (ketinggian 25-100 m dpl) cocok untuk perkebunan, agroforestri, dan pertanian lahan kering; WTU utama Id (ketinggian 100-500 m dpl) cocok untuk perkebunan dan agroforestri; WTU utama II (ketinggian 500-1.000 m dpl) lebih cocok sebagai kawasan lindung; serta WTU terbatas II (ketinggian >1.000 m dpl) yang diperuntukkan sebagai kawasan lindung. Pengelolaan wilayah berdasarkan pola WTU ini dapat mendukung upaya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama di sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

c. Informasi Umum Data Kependudukan;

Jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kabupaten Tabalong bervariasi, pada tahun 2024, total jumlah penduduk mencapai 264.694 jiwa. Kecamatan Murung Pudak menjadi wilayah dengan penduduk terbanyak, mencapai 58.451 jiwa, sementara Kecamatan Muara Harus memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yaitu 7.209 jiwa.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2024)

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	2	3
1.	Banua Lawas	21.220
2.	Kelua	25.818
3.	Tanta	24.013
4.	Tanjung	37.577
5.	Haruai	24.567
6.	Murung Pudak	58.451
7.	Muara Uya	24.771
8.	Muara Harus	7.209
9.	Pugaan	7.819
10.	Upau	7.776
11.	Jaro	15.835
12.	Bintang Ara	9.638
	Jumlah	264.694

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2024

Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk Kabupaten Tabalong menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil. Pada tahun 2020, jumlah penduduk tercatat sebanyak 245.765 jiwa dan terus bertambah hingga mencapai 264.694 jiwa pada tahun 2024. Kenaikan jumlah penduduk ini terjadi di seluruh kecamatan, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi di Kecamatan Murung Pudak.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk
per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2020-2024)

No.	Kecamatan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Banua Lawas	20.018	20.319	20.763	21.112	21.220
2.	Kelua	24.396	24.816	25.324	25.702	25.818
3.	Tanta	21.073	21.947	22.875	23.614	24.013
4.	Tanjung	35.786	36.472	37.059	37.367	37.577
5.	Haruai	23.418	23.829	24.366	24.486	24.567
6.	Murung Pudak	52.794	54.471	56.235	57.721	58.451
7.	Muara Uya	23.084	23.735	24.319	24.668	24.771
8.	Muara Harus	6.828	7.007	7.138	7.188	7.209
9.	Pugaan	7.379	7.510	7.728	7.811	7.819
10.	Upau	7.278	7.400	7.664	7.752	7.776
11.	Jaro	14.717	15.228	15.676	15.731	15.835
12.	Bintang Ara	8.994	9.170	9.378	9.479	9.638
	Kab. Tabalong	245.765	251.904	258.525	262.631	264.694

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2024

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong selama periode 2020-2024 menunjukkan variasi antar kecamatan. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten berada pada kisaran 2,2% per tahun. Kecamatan Tanta mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sementara Kecamatan Kelua mengalami sedikit penurunan pada periode 2023-2024.

Tabel 1.3 Tingkat Pertumbuhan Penduduk
per Kecamatan di Kabupaten Tabalong (2020-2024)

No	Kecamatan	Pertumbuhan Penduduk				
		2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	Rata-Rata
1	2	3	4	5	6	7
1.	Banua Lawas	0,0150	0,0219	0,0168	0,022	0,019
2.	Kelua	0,0172	0,0205	0,0149	-0,020	0,008
3.	Tanta	0,0415	0,0423	0,0323	0,050	0,041
4.	Tanjung	0,0192	0,0161	0,0083	0,014	0,014
5.	Haruai	0,0176	0,0225	0,0049	0,008	0,013
6.	Murung Pudak	0,0318	0,0324	0,0264	0,039	0,033
7.	Muara Uya	0,0282	0,0246	0,0144	0,019	0,021
8.	Muara Harus	0,0262	0,0187	0,0070	0,010	0,015
9.	Pugaan	0,0178	0,0290	0,0107	0,012	0,017
10.	Upau	0,0168	0,0357	0,0115	0,015	0,020
11.	Jaro	0,0347	0,0294	0,0035	0,010	0,019
12.	Bintang Ara	0,0196	0,0227	0,0108	0,028	0,020
	Kab. Tabalong	0,0250	0,0263	0,0159	0,020	0,022

Sumber : DKB I Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong, 2024 (diolah)

d. Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa;

Kabupaten Tabalong memiliki luas 394.600 hektare yang terbagi dalam 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa. Kecamatan terluas adalah

Bintang Ara (31,42% dari total luas), sedangkan yang terkecil adalah Muara Harus (0,77%). Kecamatan dengan kelurahan meliputi Kelua (1), Murung Pudak (5), dan Tanjung (4), sementara kecamatan lainnya hanya terdiri dari desa. Tabel berikut merinci luas wilayah, persentase, serta jumlah kelurahan dan desa di masing-masing kecamatan.

Tabel 1.4 Luas Wilayah, Persentase, dan Jumlah Kelurahan/Desa per Kecamatan di Kabupaten Tabalong

No.	Kecamatan	Luas (Ha)*	Persentase thd luas kabupaten (%)	Kelurahan	Desa
1	2	3	4	5	6
1.	Banua Lawas	15.235,68	4,38	-	15
2.	Kelua	5.336,03	1,53	1	11
3.	Tanta	14.984,12	4,31	-	14
4.	Tanjung	19.562,42	5,63	4	11
5.	Haruai	27.207,06	7,83	-	13
6.	Murung Pudak	17.257,30	4,96	5	5
7.	Muara Uya	87.324,47	25,12	-	14
8.	Muara Harus	2.680,70	0,77	-	7
9.	Pugaan	3.168,35	0,91	-	7
10.	Upau	18.275,16	5,26	-	6
11.	Jaro	27.395,49	7,88	-	9
12.	Bintang Ara	109.251,16	31,42	-	9
	Jumlah	347.677,93	100	10	121

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, 2024

e. Rincian Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah;

Tabel berikut menyajikan daftar perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah (UKPD) di Kabupaten Tabalong beserta dasar hukum pembentukannya. Regulasi utama yang menjadi dasar penyusunan struktur ini adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.

Tabel 1.5 Daftar Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Beserta Dasar Hukumnya

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	
3.	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	
4.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	
5.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	
6.	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	
7.	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	
9.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	
10.	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	

No	Nama Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	2	3
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	
13.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Tabalong	
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	
15.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	
16.	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	
17.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	
18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	
19.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	
20.	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	
21.	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	
23.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	
24.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	
25.	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	
28.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	
29.	RSUD H. Badaruddin Kasim	
30.	Kecamatan Banua Lawas	
31.	Kecamatan Bintang Ara	
32.	Kecamatan Haruai	
33.	Kecamatan Jaro	
34.	Kecamatan Kelua	
35.	Kecamatan Muara Harus	
36.	Kecamatan Muara Uya	
37.	Kecamatan Murung Pudak	
38.	Kecamatan Pugaan	
39.	Kecamatan Tanjung	
40.	Kecamatan Tanta	
41.	Kecamatan Upau	

Sumber : Sekretariat Daerah Kab. Tabalong, 2024

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Data berikut menyajikan gambaran umum tentang jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

ASN dikategorikan berdasarkan jenis jabatan, yaitu struktural, fungsional, dan pelaksana.

Secara keseluruhan, jumlah ASN di Kabupaten Tabalong mencapai 3.688 pegawai, yang terdiri dari 464 pegawai struktural, 2.596 pegawai fungsional, dan 628 pegawai pelaksana. Dari data ini, terlihat bahwa pegawai fungsional mendominasi jumlah ASN, terutama di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian teknis dan pelayanan publik seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (1.677 pegawai fungsional) serta Dinas Kesehatan (471 pegawai fungsional).

Tabel 1.6 Jumlah ASN per Perangkat Daerah di Kabupaten Tabalong Berdasarkan Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang (2024)

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan Dan Pelatihan	7	9	8	24
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	5	5	16
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	5	0	6	11
4	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	5.02 Keuangan	14	3	13	30
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	5.02 Keuangan	17	1	11	29
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	5.01 Perencanaan 5.05 Penelitian Dan Pengembangan	9	8	16	33
7	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	7	3	5	15
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	9	7	7	23
9	Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	11	471	62	544
10	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	18	61	17	96

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
		3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian				
11	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika 2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	8	13	6	27
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah 3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	19	13	33	65
13	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	17	5	43	65
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	20	8	27	55
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	7	6	7	20
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kab.Tabalong	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak 2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	9	7	5	21
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	8	6	8	22

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
18	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	17	1677	85	1779
19	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	16	4	18	38
20	Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	12	5	6	23
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	7	8	11	26
22	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman 2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	6	7	7	20
23	Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	2	9	18
24	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	8	8	8	24
25	Inspektorat Daerah Kabupaten Tabalong	6.01 Inspektorat Daerah	9	25	7	41
26	RSUD H. Badaruddin Kasim	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	14	181	29	224
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	16	11	8	35
28	Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	4.01 Sekretariat Daerah	20	29	50	99
29	Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong	4.02 Sekretariat Dprd	5	7	18	30
30	Kecamatan Banua Lawas	7.01 Kecamatan	6	0	10	16
31	Kecamatan Bintang Ara	7.01 Kecamatan	8	0	4	12
32	Kecamatan Haruai	7.01 Kecamatan	8	0	5	13
33	Kecamatan Jaro	7.01 Kecamatan	8	1	7	16
34	Kecamatan Kelua	7.01 Kecamatan	13	2	7	22
35	Kecamatan Muara Harus	7.01 Kecamatan	7	0	8	15
36	Kecamatan Muara Uya	7.01 Kecamatan	7	1	4	12
37	Kecamatan Murung Pudak	7.01 Kecamatan	32	0	11	43
38	Kecamatan Pugaan	7.01 Kecamatan	6	0	7	13
39	Kecamatan Tanjung	7.01 Kecamatan	25	1	17	43

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan / Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
40	Kecamatan Tanta	7.01 Kecamatan	8	1	11	20
41	Kecamatan Upau	7.01 Kecamatan	8	0	2	10
Jumlah			464	2596	628	3688

Sumber : BKPSDM Kab.Tabalong, 2024 (diolah)

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)

Tabel 1.7 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	2.665.576.702.436,00	2.876.285.635.126,64
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	106.342.543.693,00	94.631.291.001,50
4.1.01	PENDIDIKAN	120.000.000,00	108.300.000,00
4.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	120.000.000,00	108.300.000,00
4.1.02	KESEHATAN	105.252.543.693,00	93.694.722.594,50
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	18.299.881.693,00	18.363.834.614,17
4.1.02.1-02.0-00.0-00.02	RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	86.952.662.000,00	75.330.887.980,33
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	970.000.000,00	828.268.407,00
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	970.000.000,00	828.268.407,00
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6.129.451.640,00	6.948.587.996,00
4.2.07	TENAGA KERJA	486.545.803,00	655.723.218,00
4.2.07.2-07.0-00.0-00.01	DINAS TENAGA KERJA	486.545.803,00	655.723.218,00
4.2.09	PANGAN	292.000.000,00	305.963.000,00
4.2.09.2-09.3-25.3-27.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	292.000.000,00	305.963.000,00
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	945.000.000,00	1.377.463.401,00
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	945.000.000,00	1.377.463.401,00
4.2.15	PERHUBUNGAN	1.550.000.000,00	1.930.238.577,00
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	1.550.000.000,00	1.930.238.577,00
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.730.905.837,00	2.415.561.800,00
4.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.730.905.837,00	2.415.561.800,00
4.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	125.000.000,00	263.638.000,00
4.2.19.2-19.3-26.0-00.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	125.000.000,00	263.638.000,00
4.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	9.500.000,00	9.560.000,00
4.3.27	PERTANIAN	9.500.000,00	9.560.000,00
4.3.27.3-27.0-00.0-00.02	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	9.500.000,00	9.560.000,00
4.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	454.912.500,00	519.350.000,00
4.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	454.912.500,00	519.350.000,00
4.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	454.912.500,00	519.350.000,00
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.552.640.294.603,00	2.774.176.846.129,14
4.5.02	KEUANGAN	2.552.627.294.603,00	2.774.176.846.129,14

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2.327.313.820.603,00	2.684.206.962.468,14
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	225.313.474.000,00	89.969.883.661,00
4.5.03	KEPEGAWAIAN	13.000.000,00	0,00
4.5.03.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13.000.000,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	3.183.167.179.768,00	2.718.184.089.048,70
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.938.160.288.191,00	1.604.989.420.846,78
5.1.01	PENDIDIKAN	511.376.816.373,00	454.926.692.768,28
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	511.376.816.373,00	454.926.692.768,28
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	444.544.317.216,00	395.376.155.771,28
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	359.820.868.000,00	319.317.856.861,28
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.225.649.216,00	66.722.425.810,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	9.497.800.000,00	9.335.873.100,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	66.832.499.157,00	59.550.536.997,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	2.119.730.000,00	0,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.226.574.247,00	11.591.092.992,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.344.493.814,00	43.089.662.392,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.960.856.048,00	1.745.494.473,00
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.180.845.048,00	3.124.287.140,00
5.1.02	KESEHATAN	441.937.545.149,00	347.768.935.767,50
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	270.856.064.224,00	212.797.195.078,50
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	211.964.159.665,00	180.392.512.766,50
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	104.517.537.019,00	92.863.890.385,98
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.610.515.646,00	85.692.515.380,52
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.836.107.000,00	1.836.107.000,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	58.891.904.559,00	32.404.682.312,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.206.288.559,00	12.616.512.592,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.870.000.000,00	19.022.575.125,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	721.216.000,00	721.000.000,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	94.400.000,00	44.594.595,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02	RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM	171.081.480.925,00	134.971.740.689,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	157.075.292.010,00	126.204.854.231,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	59.149.940.780,00	51.212.937.149,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.925.351.230,00	74.991.917.082,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	14.006.188.915,00	8.766.886.458,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.004.839.951,00	8.720.922.163,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.501.348.964,00	45.964.295,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.000.000,00	0,00
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	609.735.751.412,00	477.519.438.372,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	609.735.751.412,00	477.519.438.372,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	82.938.694.006,00	75.536.172.642,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.972.757.000,00	10.621.139.454,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.965.937.006,00	64.915.033.188,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	526.797.057.406,00	401.983.265.730,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	5.100.675.000,00	5.095.898.377,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	608.180.298,00	572.275.000,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	68.968.457.167,00	38.504.938.535,00
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	452.119.744.941,00	357.810.153.818,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	292.244.689.598,00	250.712.272.178,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	292.244.689.598,00	250.712.272.178,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1	BELANJA OPERASI	66.725.300.118,00	59.617.687.399,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.01	Belanja Pegawai	6.079.298.000,00	5.149.674.423,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.586.002.118,00	35.508.012.976,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.05	Belanja Hibah	600.000.000,00	600.000.000,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.1.06	Belanja Bantuan Sosial	18.460.000.000,00	18.360.000.000,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2	BELANJA MODAL	225.519.389.480,00	191.094.584.779,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.01	Belanja Modal Tanah	34.780.000.000,00	30.258.937.461,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	561.209.133,00	545.275.000,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.167.052.693,00	3.113.679.693,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	186.611.127.654,00	156.804.943.929,00
5.1.04.1-04.2-10.1-05.05.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	400.000.000,00	371.748.696,00
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	32.323.912.196,00	28.799.101.555,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	20.237.523.875,00	18.268.741.966,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	17.148.999.732,00	15.287.894.572,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.986.522.000,00	7.085.863.058,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.162.477.732,00	8.202.031.514,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	3.088.524.143,00	2.980.847.394,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.850.784.271,00	2.753.954.975,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	237.739.872,00	226.892.419,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	12.086.388.321,00	10.530.359.589,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	9.202.643.460,00	8.083.825.632,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	2.784.971.000,00	2.372.459.277,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.417.672.460,00	5.711.366.355,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	2.883.744.861,00	2.446.533.957,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.795.154.861,00	2.359.042.882,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	88.590.000,00	87.491.075,00
5.1.06	SOSIAL	50.541.573.463,00	45.262.980.206,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	DINAS SOSIAL	50.541.573.463,00	45.262.980.206,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	49.161.899.266,00	43.977.981.483,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.301.011.000,00	4.247.722.264,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.935.438.266,00	25.380.529.219,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.925.450.000,00	14.349.730.000,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.379.674.197,00	1.284.998.723,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	607.489.702,00	549.444.775,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	563.809.255,00	528.213.788,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	208.375.240,00	207.340.160,00
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	411.416.979.527,00	361.848.229.245,92
5.2.07	TENAGA KERJA	25.978.149.745,00	23.228.911.598,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01	DINAS TENAGA KERJA	25.978.149.745,00	23.228.911.598,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.181.932.336,00	13.475.239.797,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.907.647.000,00	5.695.067.504,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.274.285.336,00	7.780.172.293,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	9.796.217.409,00	9.753.671.801,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.777.165.180,00	9.740.071.801,00
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	5.429.500,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	dan Irigasi		
5.2.07.2-07.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.622.729,00	13.600.000,00
5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	18.877.981.792,00	16.295.717.164,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	18.877.981.792,00	16.295.717.164,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.662.391.329,00	14.187.450.714,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.825.739.000,00	4.957.728.429,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.836.652.329,00	9.229.722.285,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.215.590.463,00	2.108.266.450,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.811.720.463,00	1.745.037.308,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	399.955.000,00	359.314.142,00
5.2.08.2-08.2-14.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.915.000,00	3.915.000,00
5.2.09	PANGAN	85.182.650.404,00	75.792.520.538,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	85.182.650.404,00	75.792.520.538,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1	BELANJA OPERASI	61.820.647.919,00	54.689.220.232,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.01	Belanja Pegawai	24.436.751.000,00	22.672.506.305,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.043.896.919,00	31.676.713.927,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	340.000.000,00	340.000.000,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2	BELANJA MODAL	23.362.002.485,00	21.103.300.306,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.105.817.285,00	3.767.558.799,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.895.739.902,00	4.678.545.640,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	13.790.445.298,00	12.149.989.094,00
5.2.09.2-09.3-25.3-27.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	570.000.000,00	507.206.773,00
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	77.578.920.624,00	65.918.070.782,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	77.578.920.624,00	65.918.070.782,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	51.106.501.349,00	44.780.709.877,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.466.008.000,00	10.264.543.260,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.640.493.349,00	34.516.166.617,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	26.472.419.275,00	21.137.360.905,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	7.076.738.222,00	4.563.636.713,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.990.166.742,00	12.662.503.000,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.112.514.586,00	3.798.238.192,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	240.000.000,00	65.823.000,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.599.725,00	8.000.000,00
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	44.400.000,00	39.160.000,00
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.246.779.704,00	14.293.543.439,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	17.246.779.704,00	14.293.543.439,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	12.220.109.305,00	10.148.480.114,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.092.125.956,00	5.414.914.157,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.127.983.349,00	4.733.565.957,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	5.026.670.399,00	4.145.063.325,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.607.043.124,00	3.798.470.142,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.127.275,00	0,00
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	379.500.000,00	346.593.183,00
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32.347.521.738,00	30.342.330.981,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32.347.521.738,00	30.342.330.981,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	32.047.560.864,00	30.090.310.711,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.383.400.000,00	4.540.247.029,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.664.160.864,00	25.550.063.682,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	299.960.874,00	252.020.270,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	299.960.874,00	252.020.270,00
5.2.15	PERHUBUNGAN	23.577.694.793,00	21.843.042.293,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	23.577.694.793,00	21.843.042.293,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	22.423.929.574,00	20.923.478.570,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.149.613.700,00	7.103.912.090,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.952.792.235,00	9.498.042.841,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	4.321.523.639,00	4.321.523.639,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.153.765.219,00	919.563.723,00
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.153.765.219,00	919.563.723,00
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	23.490.741.784,00	20.291.617.014,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	23.490.741.784,00	20.291.617.014,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	21.778.005.138,00	18.862.072.720,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	6.781.255.000,00	6.037.197.819,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.686.667.138,00	10.514.791.901,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	2.310.083.000,00	2.310.083.000,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	1.712.736.646,00	1.429.544.294,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.517.938.841,00	1.239.712.612,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	194.797.805,00	189.831.682,00
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	53.531.802.850,00	46.823.743.966,92
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	53.531.802.850,00	46.823.743.966,92
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	25.757.806.058,00	21.399.362.190,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	12.659.561.000,00	11.916.386.514,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.374.875.058,00	9.482.975.676,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.04	Belanja Subsidi	723.370.000,00	0,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2	BELANJA MODAL	27.773.996.792,00	25.424.381.776,92
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.01	Belanja Modal Tanah	1.194.750.000,00	1.194.750.000,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	708.666.035,00	609.222.164,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.809.480.757,00	23.566.616.820,92
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	42.792.792,00
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	11.100.000,00	11.000.000,00
5.2.18	PENANAMAN MODAL	14.059.865.401,00	11.938.347.509,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	14.059.865.401,00	11.938.347.509,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.869.530.586,00	10.187.985.428,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.589.547.000,00	5.040.161.886,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.279.983.586,00	5.147.823.542,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	2.190.334.815,00	1.750.362.081,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.672.921.165,00	1.363.418.152,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.863.650,00	99.421.929,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	200.000.000,00	198.500.000,00
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	95.550.000,00	89.022.000,00
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	26.643.490.319,00	23.331.164.702,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	26.643.490.319,00	23.331.164.702,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	21.004.695.090,00	18.207.993.759,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.779.608.000,00	3.961.450.019,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.121.487.090,00	8.142.943.740,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	6.103.600.000,00	6.103.600.000,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2	BELANJA MODAL	5.638.795.229,00	5.123.170.943,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan	605.368.439,00	525.845.045,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	Mesin		
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.031.426.790,00	4.597.325.898,00
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.000.000,00	0,00
5.2.23	PERPUSTAKAAN	12.901.380.373,00	11.749.219.259,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.901.380.373,00	11.749.219.259,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	11.691.871.556,00	10.586.154.114,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	6.060.026.000,00	5.654.458.886,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.631.845.556,00	4.931.695.228,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.209.508.817,00	1.163.065.145,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	618.676.077,00	575.526.673,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.210.011,00	11.000.000,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	458.622.729,00	456.816.772,00
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	120.000.000,00	119.721.700,00
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	52.655.891.903,00	45.088.834.733,00
5.3.27	PERTANIAN	52.655.891.903,00	45.088.834.733,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	52.655.891.903,00	45.088.834.733,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	33.403.082.535,00	29.187.407.897,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	7.410.009.000,00	6.028.167.797,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.993.073.535,00	23.159.240.100,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	19.252.809.368,00	15.901.426.836,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.01	Belanja Modal Tanah	1.600.000.000,00	1.506.470.406,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	966.972.967,00	913.487.829,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.431.240.685,00	5.657.084.537,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.159.595.716,00	7.738.798.478,00
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	95.000.000,00	85.585.586,00
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	189.662.758.628,00	160.913.323.259,00
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	105.599.553.978,00	96.947.889.569,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	105.599.553.978,00	96.947.889.569,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	97.804.946.244,00	91.317.870.852,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	25.477.982.000,00	23.205.919.337,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.121.964.244,00	54.686.951.515,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	14.205.000.000,00	13.425.000.000,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	7.794.607.734,00	5.630.018.717,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.391.450.022,00	4.161.296.211,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.158.157.712,00	1.315.222.506,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	245.000.000,00	153.500.000,00
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	84.063.204.650,00	63.965.433.690,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DPRD	84.063.204.650,00	63.965.433.690,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	77.485.310.577,00	59.335.373.191,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	27.587.529.626,00	24.973.243.583,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.897.780.951,00	34.362.129.608,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	6.577.894.073,00	4.630.060.499,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.482.215.567,00	2.726.255.041,00
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.095.678.506,00	1.903.805.458,00
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	444.764.245.424,00	412.798.087.286,00
5.5.01	PERENCANAAN	21.514.520.003,00	18.006.812.154,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	21.514.520.003,00	18.006.812.154,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	20.262.557.233,00	16.955.142.504,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.243.211.000,00	7.068.032.212,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.019.346.233,00	9.887.110.292,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.251.962.770,00	1.051.669.650,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.064.993.913,00	865.472.189,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	136.968.857,00	136.547.461,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.650.000,00
5.5.02	KEUANGAN	406.408.376.889,00	379.818.722.707,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	383.877.916.617,00	360.659.261.472,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	33.673.348.763,00	21.244.918.221,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	15.434.012.015,00	8.905.260.858,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.889.756.748,00	7.980.551.109,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	4.359.106.254,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	20.053.931.348,00	18.429.850.451,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.272.213.348,00	17.849.153.571,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.818.000,00	97.418.880,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	30.000.000,00	20.733.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	653.900.000,00	462.545.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	318.999.492.800,00	318.999.492.800,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.968.300.000,00	20.968.300.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	298.031.192.800,00	298.031.192.800,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	22.530.460.272,00	19.159.461.235,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	19.839.390.905,00	16.912.959.415,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	10.788.427.000,00	9.717.884.030,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.050.963.905,00	7.195.075.385,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	2.691.069.367,00	2.246.501.820,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.440.070.906,00	1.136.992.540,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	624.453.461,00	575.758.280,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	194.995.000,00	167.151.000,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	431.550.000,00	366.600.000,00
5.5.03	KEPEGAWAIAN	16.841.348.532,00	14.972.552.425,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	16.841.348.532,00	14.972.552.425,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	16.438.337.713,00	14.608.192.425,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	5.757.054.000,00	5.343.440.150,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.681.283.713,00	9.264.752.275,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	403.010.819,00	364.360.000,00
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	403.010.819,00	364.360.000,00
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	18.610.213.575,00	15.160.974.659,00
5.6.01	INSPEKTORAT	18.610.213.575,00	15.160.974.659,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT	18.610.213.575,00	15.160.974.659,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.187.990.588,00	14.759.354.659,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.847.313.000,00	11.066.692.141,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.340.677.588,00	3.692.662.518,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	422.222.987,00	401.620.000,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	387.222.987,00	366.620.000,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35.000.000,00	35.000.000,00
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	78.145.234.133,00	71.360.346.948,00
5.7.01	KECAMATAN	78.145.234.133,00	71.360.346.948,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN TANJUNG	14.822.782.672,00	13.582.170.028,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	14.203.010.358,00	13.026.885.805,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	8.290.132.000,00	7.776.455.401,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.912.878.358,00	5.250.430.404,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	619.772.314,00	555.284.223,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	587.959.753,00	528.033.506,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan,	3.031.016,00	1.782.248,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
	dan Irigasi		
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.781.545,00	25.468.469,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN MURUNG PUDAK	17.218.020.826,00	15.388.962.475,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	16.049.415.297,00	14.481.040.962,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	8.440.372.000,00	7.840.781.973,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.609.043.297,00	6.640.258.989,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	1.168.605.529,00	907.921.513,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	626.004.367,00	555.232.765,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	522.601.162,00	352.688.748,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	20.000.000,00	0,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN TANTA	5.221.511.000,00	4.832.370.418,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	4.979.609.680,00	4.617.651.811,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	3.450.320.000,00	3.186.074.714,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.529.289.680,00	1.431.577.097,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	241.901.320,00	214.718.607,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	157.909.320,00	138.468.739,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	83.992.000,00	76.249.868,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN MUARA HARUS	4.181.626.269,00	3.786.669.452,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	4.141.644.318,00	3.751.002.786,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	2.951.845.000,00	2.752.316.667,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.189.799.318,00	998.686.119,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	39.981.951,00	35.666.666,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.981.951,00	35.666.666,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN BANUA LAWAS	4.721.165.000,00	4.329.589.637,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	4.604.010.894,00	4.228.711.257,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	3.250.186.000,00	2.961.117.249,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.353.824.894,00	1.267.594.008,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	117.154.106,00	100.878.380,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	117.154.106,00	100.878.380,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN KELUA	6.462.242.352,00	6.192.609.564,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	6.428.306.621,00	6.162.369.564,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	4.123.815.000,00	3.936.472.870,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.304.491.621,00	2.225.896.694,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2	BELANJA MODAL	33.935.731,00	30.240.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.935.731,00	30.240.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN PUGAAN	4.304.723.000,00	3.798.738.165,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	4.222.053.424,00	3.733.760.688,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	3.008.216.000,00	2.693.626.212,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.213.837.424,00	1.040.134.476,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	82.669.576,00	64.977.477,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	82.669.576,00	64.977.477,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN JARO	4.146.708.000,00	3.965.595.618,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	4.031.679.205,00	3.856.114.018,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	2.870.558.000,00	2.770.609.928,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.121.205,00	1.085.504.090,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	115.028.795,00	109.481.600,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	71.392.425,00	70.425.000,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.636.370,00	39.056.600,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN MUARA UYA	5.364.386.043,00	4.903.421.725,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	4.761.281.766,00	4.380.548.753,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	2.767.756.000,00	2.590.080.697,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.993.525.766,00	1.790.468.056,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	603.104.277,00	522.872.972,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	603.104.277,00	522.872.972,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10	KECAMATAN HARUAI	3.890.366.362,00	3.625.139.316,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1	BELANJA OPERASI	3.752.178.161,00	3.507.211.388,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.01	Belanja Pegawai	2.505.770.000,00	2.380.512.945,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.246.408.161,00	1.126.698.443,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2	BELANJA MODAL	138.188.201,00	117.927.928,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.10.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	138.188.201,00	117.927.928,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11	KECAMATAN UPAU	3.817.070.494,00	3.438.882.649,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1	BELANJA OPERASI	3.548.582.003,00	3.195.657.425,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.01	Belanja Pegawai	2.319.504.000,00	2.112.202.649,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.229.078.003,00	1.083.454.776,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2	BELANJA MODAL	268.488.491,00	243.225.224,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	244.306.651,00	221.463.963,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.11.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24.181.840,00	21.761.261,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12	KECAMATAN BINTANG ARA	3.994.632.115,00	3.516.197.901,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1	BELANJA OPERASI	3.831.347.502,00	3.383.720.424,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.01	Belanja Pegawai	2.577.570.000,00	2.367.728.626,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.253.777.502,00	1.015.991.798,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2	BELANJA MODAL	163.284.613,00	132.477.477,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.12.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	163.284.613,00	132.477.477,00
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	49.751.568.387,00	46.024.872.071,00
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49.751.568.387,00	46.024.872.071,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	49.751.568.387,00	46.024.872.071,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	49.474.272.780,00	45.775.078.917,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.958.891.000,00	4.032.200.878,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.903.755.914,00	6.131.289.839,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	35.611.625.866,00	35.611.588.200,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	277.295.607,00	249.793.154,00
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	277.295.607,00	249.793.154,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 2024 (Unaudited)

Tabel 1.8 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah TA 2024

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
4	PENDAPATAN DAERAH	2.665.576.702.436,00	2.876.285.635.126,64
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	247.404.526.277,00	264.607.523.905,64
4.1.01	Pajak Daerah	85.313.474.000,00	89.780.105.185,00
4.1.02	Retribusi Daerah	111.795.793.776,00	100.474.184.730,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.800.883.644,00	14.735.829.206,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.494.374.857,00	59.617.404.784,31
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.278.172.176.159,00	2.611.678.111.221,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.046.413.738.000,00	2.401.653.905.992,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.914.611.170.000,00	2.272.736.886.992,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	102.226.677.000,00	102.226.677.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	29.575.891.000,00	26.690.342.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	231.758.438.159,00	210.024.205.229,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	231.758.438.159,00	210.024.205.229,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	140.000.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	140.000.000.000,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	3.183.167.179.768,00	2.718.184.089.048,70
5.1	BELANJA OPERASI	1.784.448.643.144,00	1.550.436.515.684,78
5.1.01	Belanja Pegawai	825.804.659.096,00	729.838.937.687,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	843.359.844.543,00	709.644.966.804,52
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000,00	4.359.106.254,00
5.1.04	Belanja Subsidi	723.370.000,00	0,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
1	2	3	4
5.1.05	Belanja Hibah	74.485.739.505,00	73.543.774.939,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.725.450.000,00	33.049.730.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.068.567.900.118,00	846.763.080.563,92
5.2.01	Belanja Modal Tanah	51.871.893.222,00	42.619.692.957,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	128.281.067.573,00	108.059.565.476,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	214.678.336.134,00	152.095.305.224,92
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	666.521.821.413,00	537.443.825.200,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.499.381.776,00	4.355.098.455,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.715.400.000,00	2.189.593.251,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.151.143.706,00	1.985.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	318.999.492.800,00	318.999.492.800,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.968.300.000,00	20.968.300.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	298.031.192.800,00	298.031.192.800,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 2024 (Unaudited)

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Tabel 1.9 Realisasi Anggaran Menurut Program TA 2024

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
1	PENDIDIKAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.744.435.362,00	323.217.486.048,28
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	131.895.256.247,00	121.017.568.243,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.695.159.652,00	3.065.394.646,00
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.175.261.919,00	6.952.564.201,00
		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	866.703.193,00	673.679.630,00
2	KESEHATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	286.447.305.431,00	219.530.974.885,00
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145.015.131.248,00	95.517.085.273,00
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.353.154.420,00	3.607.699.003,00
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	520.262.100,00	98.441.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	601.691.950,00	104.911.600,00
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.890.294.306,00	477.519.438.372,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	13.467.660.601,00	12.112.153.898,00
		PROGRAM PENGELOLAAN	39.918.746.993,00	37.154.309.579,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7.590.670.606,00	7.399.072.553,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	598.471.906,00	486.455.197,00
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	85.049.846.750,00	53.653.326.089,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	444.302.805.782,00	350.256.192.314,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	567.250.071,00	406.196.103,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.350.004.397,00	2.195.664.270,00
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.043.628.648,00	11.620.417.840,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.515.098.000,00	2.374.503.412,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	19.992.725.540,00	18.762.368.034,00
		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	70.074.000,00	43.869.200,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	8.541.796.000,00	8.396.116.081,00
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	35.339.707.000,00	30.647.275.742,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	212.480.902.410,00	178.668.389.069,00
		PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	260.758.000,00	199.332.800,00
5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.771.111.528,00	14.848.727.598,00
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.134.012.339,00	4.564.389.223,00
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	6.499.874.615,00	5.517.413.376,00
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.918.913.714,00	3.868.571.358,00
6	SOSIAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.010.541.839,00	7.229.494.094,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.115.273.917,00	3.882.696.908,00
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.953.086.754,00	3.639.993.488,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	31.039.110.105,00	28.283.753.633,00
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.075.866.847,00	930.330.776,00
		PROGRAM PENGELOLAAN	1.347.694.001,00	1.296.711.307,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		TAMAN MAKAM PAHLAWAN		
7	TENAGA KERJA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.381.766.031,00	13.685.331.182,00
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	115.254.726,00	106.371.935,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	6.928.551.427,00	6.151.684.951,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	3.219.021.561,00	2.970.406.619,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	333.556.000,00	315.116.911,00
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.737.902.223,00	6.483.307.221,00
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	685.058.500,00	640.733.357,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	428.031.380,00	385.991.252,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	339.083.672,00	301.174.423,00
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.932.703.522,00	5.058.298.601,00
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	402.823.421,00	342.710.489,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.745.365.000,00	1.641.168.620,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	180.686.000,00	166.810.843,00
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	904.906.747,00	834.007.640,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	521.421.327,00	441.514.718,00
9	PANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.191.132.682,00	30.728.600.055,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	17.194.269.203,00	15.317.815.786,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	1.830.226.289,00	1.742.021.533,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	444.719.732,00	424.923.409,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	15.479.729.118,00	13.763.790.890,00
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	937.835.501,00	828.491.671,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	9.158.787.232,00	8.091.087.782,00
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	305.388.726,00	284.384.650,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	815.681.440,00	707.491.212,00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	580.534.964,00	387.786.744,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	291.705.223,00	240.535.578,00
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.472.421.422,00	1.220.087.286,00
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.480.218.872,00	2.055.503.942,00
10	LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.769.056.894,00	14.098.349.565,00
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	755.898.020,00	679.942.106,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	10.822.298.609,00	8.192.598.062,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	16.987.696.203,00	13.047.904.685,00
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	632.199.930,00	547.448.782,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	159.439.852,00	153.452.159,00
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	156.950.840,00	136.751.243,00
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	428.125.909,00	378.784.324,00
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	134.909.684,00	92.212.655,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	31.732.344.683,00	28.590.627.201,00
11	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.609.235.111,00	10.335.758.333,00
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	384.944.400,00	297.372.914,00
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	77.750.000,00	63.080.000,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	4.100.616.193,00	3.528.237.023,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	74.234.000,00	69.095.169,00
12	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.711.406.784,00	6.498.140.667,00
		PROGRAM PENATAAN DESA	18.164.169.680,00	18.153.491.678,00
		PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	409.399.719,00	347.899.161,00
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.144.628.346,00	3.779.240.144,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	1.917.917.209,00	1.563.559.331,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		
13	PERHUBUNGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.814.426.871,00	12.529.425.317,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	9.763.267.922,00	8.134.382.331,00
14	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.661.212.903,00	7.966.519.510,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	361.308.364,00	287.342.145,00
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	7.295.454.821,00	6.788.664.955,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	495.444.832,00	351.427.959,00
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.677.320.864,00	4.897.662.445,00
15	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.797.306.859,00	15.159.970.476,00
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	69.666.000,00	3.820.000,00
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.498.045.487,00	1.919.122.532,00
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	68.800.000,00	14.377.000,00
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	74.564.520,00	65.663.070,00
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	30.217.857.145,00	27.586.900.165,92
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	91.148.923,00	67.532.809,00
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTE	65.710.000,00	23.605.500,00
		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.181.493.000,00	297.611.893,00
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	176.038.349,00	146.283.111,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	86.487.000,00	25.444.706,00
		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	421.875.607,00	258.085.866,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	164.694.960,00	109.575.096,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.618.115.000,00	1.145.751.742,00
16	PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.140.009.702,00	8.856.158.227,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	295.369.000,00	275.747.851,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	994.795.999,00	942.129.836,00
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	661.512.017,00	469.580.933,00
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	867.313.519,00	599.759.737,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1.100.865.164,00	794.970.925,00
17	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.026.162.938,00	5.893.581.530,00
		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	1.777.955.095,00	1.460.496.911,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	934.313.082,00	370.493.704,00
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.949.831.835,00	1.577.573.546,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.750.227.369,00	12.824.019.011,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00
18	PERPUSTAKAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.949.857.757,00	8.931.579.716,00
		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.928.997.011,00	1.839.091.634,00
		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	628.091.773,00	600.669.233,00
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	394.433.832,00	377.878.676,00
19	PERTANIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.107.615.188,00	11.212.322.479,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	19.268.642.991,00	18.142.234.327,00
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	16.821.912.109,00	13.712.456.345,00
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.293.706.978,00	1.141.097.692,00
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.164.014.637,00	880.723.890,00
20	SEKRETARIAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	57.139.828.223,00	50.352.691.634,00
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	43.534.023.615,00	42.191.455.319,00
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.925.702.140,00	4.403.742.616,00
21	SEKRETARIAT DPRD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.629.056.304,00	36.420.238.991,00
		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	39.434.148.346,00	27.545.194.699,00
22	PERENCANAAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.823.712.723,00	10.703.294.488,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		DAERAH KABUPATEN/KOTA		
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.394.483.915,00	1.738.553.882,00
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.733.953.836,00	3.224.363.183,00
		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.562.369.529,00	2.340.600.601,00
23	KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	58.332.322.969,00	46.106.544.482,00
		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	339.757.189.985,00	224.909.369.012,00
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	3.168.680.238,00	2.346.613.306,00
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.150.183.697,00	4.229.518.907,00
24	KEPEGAWAIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.873.597.777,00	8.076.681.221,00
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.162.529.993,00	4.524.126.428,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.805.220.762,00	2.371.744.776,00
25	INSPEKTORAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.335.368.135,00	14.109.356.971,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.340.550.110,00	523.732.483,00
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	934.295.330,00	527.885.205,00
26	KECAMATAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.774.163.429,00	59.509.858.837,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.038.865.358,00	2.801.016.195,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.130.011.625,00	5.396.106.536,00
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.061.783.810,00	914.860.674,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	2.431.679.700,00	2.195.281.764,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	708.730.211,00	543.222.942,00
27	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.454.024.281,00	6.275.719.848,00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.070.086.118,00	1.493.375.314,00
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA	29.545.193.568,00	29.151.468.023,00

No	Urusan Pemerintahan Daerah	Nama Program	Alokasi Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)
1	2	3	4	5
		SERTA BUDAYA POLITIK		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	760.171.000,00	528.144.600,00
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.046.429.420,00	564.044.827,00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.875.664.000,00	8.012.119.459,00

Sumber : BPKAD Kab. Tabalong, 2024 (Unaudited)

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;

Prioritas Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 dan hasil capaian pembangunan pada tahun sebelumnya, serta memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, RKPD Kabupaten Tabalong menetapkan 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut :

PD 1 : Percepatan dan Pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui sektor-sektor potensial dan produktif.

- Pengembangan pariwisata lokal beserta ekonomi kreatifnya.
- Mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor pertanian, industri dan UMKM.
- Peningkatan produktivitas pertanian sebagai daerah penyangga IKN.
- Mendorong perkembangan UMKM dan tumbuhnya wira usaha baru.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

PD 2 : Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau untuk mendukung terwujudnya SDM yang berdaya saing.

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesempatan kerja, penurunan kemiskinan dan pengangguran.
- Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui akses pelayanan dasar yang baik dan melalui gerakan masyarakat hidup sehat
- Peningkatan kualitas tenaga kerja yang terampil.
- Peningkatan kualitas Pendidikan.
- Peningkatan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
- Pengendalian prevalensi stunting.

PD 3 : Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah sebagai serambi depan IKN dalam mendukung konektivitas dan jalur logistik.

- Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktu untuk mendukung konektivitas dan logistik sebagai penyangga IKN

PD 4 : Kualitas Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima.

- Penguatan reformasi birokrasi.
- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak.
- Perencanaan pembangunan berbasis data dan kajian
- Pengembangan satu data Tabalong.

PD 5 : Peningkatan Kualitas lingkungan hidup.

- Pembangunan berwawasan lingkungan melalui tata kelola dan perlindungan lingkungan hidup.
- Penataan kota dan lingkungan permukiman.

Terdapat kegiatan multisektor yang menjadi *major projects* prioritas daerah tahun 2024 baik di sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, lingkungan hidup dan tata kelola bencana, sampaidengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berikut *major projects* prioritas daerah tahun 2024:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pariwisata dan peningkatan promosi destinasi wisata unggulan.
2. Pengembangan sektor pertanian melalui peningkatan kualitas petani, produksi dan pengolahan hasil serta pemasaran.
3. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan kualitas sarana dan prasarana serta pemenuhan distribusi dan kualitas SDM kesehatan.
4. Pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidik dalam mendorong kreativitas dan sekolah penggerak.
5. Pengembangan pendidikan yang berbasis vokasi sesuai potensi keunggulan daerah untuk mendukung industri 4.0.
6. Pengembangan UMKM melalui kemitraan dan peningkatan skala usaha.
7. Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik.
8. Peningkatan infrastruktur dasar untuk mewujudkan konektivitas daerah terpencil.
9. Perluasan akses air minum perpipaan.
10. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi (AKI/AKB) serta Stunting.
11. Peningkatan sarana dan prasarana/utilitas umum.
12. Pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau serta penguatan tata kelola resiko bencana.
13. Penyusunan perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka panjang daerah.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah;

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Tabalong Tahun 2019-2024, telah ditetapkan visi pembangunan sebagai arah pembangunan Kabupaten Tabalong lima tahun, yaitu **“Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri”**.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana yang telah disampaikan Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi pembangunan yang harus dilaksanakan dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Lebih Agamais**
- Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**
- Misi 3 : Mewujudkan Kemandirian Daerah**

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah;

Penentuan strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong menjadi dasar bagi pemilihan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Program pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut berdasarkan sasaran pada setiap misi.

Tabel 1.10 Strategi dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Berdasarkan Visi dan Misi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
Visi: “Menuju Kabupaten Tabalong yang Lebih Agamais, Sejahtera dan Mandiri”				
Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Lebih Agamais				
Mewujudkan masyarakat dan pemerintahan daerah yang beriman, berkepribadian dan produktif	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat	Penguatan kerjasama pemerintah dan tokoh agama dalam peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat	a. Meningkatkan fungsi dan peran tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang agamis. b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat.	Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Keagamaan
		Penguatan keterpaduan sistem pengembangan ketertiban, ketentraman dan	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan.	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
		kenyamanan		
Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat				
Memajukan perekonomian daerah yang didukung oleh pengembangan sumber daya alam dan infrastruktur yang berkelanjutan	Berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas	a. Meningkatkan potensi, kapasitas produksi dan produktivitas pertanian. b. Mengembangkan agribisnis berbasis keunggulan kompetitif dan komparatif produk daerah.	Pengembangan Agribisnis Terpadu
	Meningkatnya akses, mobilitas dan kualitas jalan yang menghubungkan seluruh wilayah kabupaten	Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan yang berkualitas dan merata	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi	Peningkatan Akses, Mobilitas dan Kualitas Jalan
	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan pangan berkelanjutan	Meningkatkan koordinasi yang sinergi lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan dan akses masyarakat terhadap air minum	Pengembangan dan peningkatan Sarana dan Prasarana serta kualitas air minum dan sanitasi yang merata	a. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air. b. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sanitasi	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Akses Air Minum
	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Penguatan kapasitas pemerintahan desa dalam kerangka otonomi desa	a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan desa dalam pembangunan daerah. b. Menguatkan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa.	Peningkatan Kualitas Pembangunan Desa
	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan	Peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) dan pelestarian lingkungan	a. Meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan potensi SDA yang berwawasan lingkungan.	Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
		hidup secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> b. Meningkatkan konservasi sumber daya alam dan lahan kritis c. Mendorong upaya penurunan emisi 	
	Meningkatnya pertumbuhan di sektor industri kecil, menengah dan koperasi	Peningkatan akses dan pengembangan sektor industri kecil, menengah, UMKM dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kompetensi dan daya saing usaha koperasi dan UMKM. b. Meningkatkan kapasitas manajemen usaha. c. Meningkatkan pengembangan IKM 	Peningkatan Pertumbuhan Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi
	Terkendalinya ketimpangan pendapatan	Peningkatan produktivitas ekonomi sesuai dengan potensi wilayah	Memberikan fasilitasi dan kemudahan pengembangan usaha dan permodalan	Peningkatan Ekonomi dan Pengendalian Ketimpangan Pendapatan
Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Daerah				
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta Masyarakat	Program Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial-Budaya serta Penerapan IPTEK
		Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan	
	Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal	Peningkatan pendapatan riil per kapita	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial	Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan	Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan	Program Peningkatan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Sosial
	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengembangan keberdayaan Perempuan dan perlindungan anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan. b. Meningkatkan perlindungan perempuan dan 	Program Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
			anak. c. Meningkatkan keluarga sejahtera.	
	Menurunnya tingkat kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan yang terpadu	Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin	Program Penurunan Tingkat Kemiskinan
Mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik.	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik	a. Meningkatkan kualitas pelayanan public yang cepat, transparan dan akuntabel. b. Mensinergikan pendidikan dan pelatihan aparatur ke arah kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan. c. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana.	Program Peningkatan Pengelolaan dan Kinerja Pemerintahan Daerah serta Kualitas Pelayanan Publik
		Pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu untuk mendukung informasi layanan publik dan kota cerdas (Smart City)	a. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi layanan publik berbasis teknologi informasi (TI). b. Meningkatkan penggunaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	
		Perwujudan manajemen perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi perencanaan pembangunan lintas sektor. b. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah. c. Intensifikasi dan ekstensifikasi	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah
			sumber- sumber pendapatan daerah d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan.	

Sumber : Perubahan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.

Pembangunan daerah merupakan upaya sistematis dan terencana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam dokumen perencanaan tahunan, yang mencakup Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD (P-RKPD). Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor pemerintahan.

Tabel berikut menyajikan jumlah program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan P-RKPD, serta alokasi pagu anggaran yang disediakan untuk masing-masing urusan pemerintahan. Secara umum, terdapat peningkatan jumlah kegiatan dan sub-kegiatan dalam P-RKPD dibandingkan dengan RKPD awal.

Beberapa urusan pemerintahan yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini menunjukkan prioritas pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, sektor pertanian, perdagangan, dan perindustrian juga mendapatkan perhatian guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Total pagu anggaran yang dialokasikan dalam RKPD sebesar Rp2.045.254.065.821,00 mengalami peningkatan signifikan dalam P-RKPD menjadi Rp3.171.660.520.768,00. Peningkatan ini menunjukkan adanya tambahan sumber daya yang dialokasikan untuk mendukung realisasi program dan kegiatan pembangunan daerah.

Tabel 1.11 Rekapitulasi Program, Kegiatan, dan Anggaran Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	3	3	12	13	60	71	379.994.489.447,00	500.664.437.739,00
2	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	20	21	71	81	263.531.382.151,00	442.077.885.149,00
3	1.03 URUSAN	9	9	19	19	45	45	249.485.544.024,00	627.856.320.183,00

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
4	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	10	10	19	21	112.876.415.413,00	241.898.232.309,00
5	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	4	4	13	13	38	40	27.891.919.009,00	32.397.362.196,00
6	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6	6	14	15	32	33	38.927.687.380,00	49.143.693.591,00
7	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5	5	15	16	26	30	11.258.720.422,00	25.366.078.662,00
8	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	19	21	29	33	8.515.180.831,00	10.929.843.453,00
9	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	6	12	13	20	19	30.921.999.498,00	39.675.975.162,00
10	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	3	3	3	3	3	3	21.723.609.000,00	33.400.509.000,00
11	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	10	15	16	24	25	60.189.005.659,00	76.890.438.423,00
12	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	16	16	36	34	12.705.921.818,00	17.357.479.824,00
13	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	9	8	27	25	15.443.424.779,00	32.846.972.338,00
14	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3	3	8	8	12	26	1.933.313.400,00	8.230.648.400,00
15	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2	2	16	16	30	25	15.563.482.024,00	23.603.705.813,00
16	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA	3	3	10	10	23	22	18.867.744.811,00	22.718.385.531,00
17	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6	6	10	10	17	17	15.807.198.090,00	18.761.105.466,00

No	Urusan	Jumlah Program		Jumlah Kegiatan		Jumlah Sub Kegiatan		Pagu Anggaran	
		RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD	RKPD	P-RKPD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMANMODAL	6	6	13	13	25	25	11.164.872.501,00	14.531.035.290,00
19	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	4	4	15	15	36	35	16.944.100.554,00	22.485.179.800,00
20	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	4	4	482.499.020,00	546.878.832,00
21	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	1	3	3	244.523.000,00	361.308.364,00
22	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2	2	3	3	3	3	3.505.921.953,00	4.214.992.845,00
23	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2	2	9	9	38	38	8.069.231.990,00	11.904.454.768,00
24	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2	2	6	6	9	9	1.136.362.540,00	1.022.525.605,00
25	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	4	5	5	5	5	7.788.764.207,00	11.138.450.091,00
26	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2	2	2	2	5	5	2.102.493.284,00	3.837.556.930,00
27	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	18	20	37	36	46.375.644.587,00	83.423.155.559,00
28	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	5	5	10	10	15	15	6.962.327.169,00	32.151.627.752,00
29	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3	3	3	3	5	5	1.675.000.000,00	2.679.212.197,00
30	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	3	3	19	20	53	52	75.638.381.263,00	103.926.053.978,00
31	4.02 SEKRETARIAT DPRD	2	2	16	16	41	41	58.698.610.822,00	87.864.853.450,00
32	5.01 PERENCANAAN	3	3	15	15	52	52	15.201.303.465,00	19.179.663.627,00
33	5.02 KEUANGAN	4	4	13	13	63	65	338.983.388.542,00	398.589.921.314,00
34	5.03 KEPEGAWAIAN	2	2	9	10	30	35	10.638.791.013,00	14.347.828.770,00
35	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	2	2	2	2	3.351.001.526,00	2.893.519.762,00
36	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1	1	3	4	9	11	3.135.339.836,00	3.799.289.836,00
37	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	3	3	9	10	24	26	14.379.044.240,00	19.183.386.898,00
38	7.01 KECAMATAN	6	6	16	17	57	56	64.694.510.946,00	79.735.307.284,00
39	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	12	12	26	26	68.444.915.607,00	50.025.244.577,00
	Jumlah	155	156	421	435	1.054	1.099	2.045.254.065.821,00	3.171.660.520.768,00

Sumber : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kab. Tabalong Tahun 2024

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar pertimbangan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong adalah dalam rangka mewujudkan pencapaian misi ke-2 Kabupaten Tabalong yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari misi ini adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sasaran dari misi ke-2 ini adalah:

- a. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial-budaya serta penerapan IPTEK secara optimal.
- b. Menurunnya tingkat kemiskinan.
- c. Meningkatnya kesempatan kerja terutama bagi penduduk lokal.
- d. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.
- e. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Sedangkan strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian misi ke-2 ini adalah :

- a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.
- c. Penanggulangan kemiskinan yang terpadu.
- d. Peningkatan pendapatan riil per kapita.
- e. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan.
- f. Pengembangan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Arah kebijakan yang diambil adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat.
- b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- c. Pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin.
- d. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui peningkatan keahlian, keterampilan dan perlindungan tenaga kerja.
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan.
- f. Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
- g. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak.
- h. Meningkatkan keluarga sejahtera.

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

- a. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan;
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2019 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Teknis

- Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman, ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/kota;
 - j. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Tabalong Tahun 2022 - 2024.
 - k. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/504/2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong.
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong 2019-2024.

Kebijakan umum dalam rencana penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 adalah :

- a. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan ditempuh dengan kebijakan meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dengan program :
 - 1) Pendidikan anak usia dini.
 - 2) Pendidikan Sekolah Dasar.
 - 3) Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
 - 4) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - 5) Pendidikan Kesetaraan Nonformal dan Informal.
- b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditempuh dengan kebijakan meningkatkan aksesibilitas, kualitas pelayanan kesehatan dan peran serta masyarakat, dengan program :
 - 1) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - 2) Upaya kesehatan masyarakat.
 - 3) Upaya Pelayanan Kesehatan.
 - 4) Sumber Daya Kesehatan.
 - 5) Peningkatan Pelayanan Kesehatan RSUD (BLUD).
 - 6) Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
 - 7) Perawatan dan Pengembangan SDM.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, dengan program :
 - 1) Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Kebinamargaan.
 - 2) Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Keciaptakaryaan.
 - 3) Pemberdayaan, Pengaturan dan Pengawasan Jasa Konstruksi
 - 4) Perencanaan dan Penataan Ruang.
 - 5) Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan.
 - 6) Kawasan Permukiman dan PSU Permukiman.
- d. Meningkatkan pengelolaan dan konservasi pengembangan sumber daya air dengan program Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Bidang Sumber Daya Air.
- e. Meningkatkan kualitas kelembagaan sosial kemasyarakatan dan

- kenegaraan, dengan program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- f. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sosial, dengan program:
 - 1) Perlindungan dan Jaminan Sosial.
 - 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
 - g. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan, dengan program :
 - 1) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
 - 2) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 - 3) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 - 4) Peningkatan Kesadaran Masyarakat.
 - h. Meningkatkan koordinasi dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana, dengan program :
 - 1) Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana.
 - 2) Pencegahan Dini dan Pengendalian Bencana Kebakaran.
 - 3) Tanggap Darurat Bencana.
 - 4) Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
 - 5) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan (DBH DR).

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan anggaran yang berlandaskan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Selama satu tahun anggaran, kebijakan ini diarahkan untuk mencapai standar pelayanan minimal serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong.

Kebijakan umum anggaran yang ditetapkan mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjamin pelayanan dasar bagi masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam sektor ekonomi, sosial, maupun infrastruktur.

Sebagai langkah strategis, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, termasuk pembiayaan belanja yang bersifat mengikat dan wajib guna menjamin kelangsungan pelayanan dasar masyarakat. Selain itu, alokasi anggaran juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Tabalong, serta mendukung program prioritas baik di tingkat provinsi maupun nasional berdasarkan pendekatan money follow program.

Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menetapkan alokasi anggaran minimal untuk beberapa sektor penting, antara lain:

- a. Sektor pendidikan dengan alokasi minimal 20 persen dari total belanja daerah.
- b. Sektor kesehatan dengan alokasi minimal 10 persen dari total belanja daerah.
- c. Infrastruktur pelayanan publik dengan alokasi minimal 40 persen dari total belanja daerah, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa.
- d. Dana Desa (ADD) dengan alokasi minimal 10 persen dari dana

perimbangan yang diterima dalam APBD.

Selain itu, dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, pemerintah mendorong kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memperluas cakupan pembangunan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.

Pemerintah Kabupaten Tabalong juga menaruh perhatian terhadap stabilitas ketentraman dan keamanan sebagai faktor penting dalam menjaga kelangsungan aktivitas sosial dan ekonomi. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya secara kondusif dan produktif.

Dengan kebijakan anggaran yang disusun secara strategis ini, Pemerintah Kabupaten Tabalong optimis dapat mencapai standar pelayanan minimal dan meningkatkan kualitas layanan publik demi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Tabalong (2023-2024)

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	75.43	75.97	0.716
2.	Angka Kemiskinan	5.77	5.64	-2.253
3.	Angka Pengangguran	3.6	3.44	-4.444
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4.9	4.87	-0.612
5.	Pendapatan Perkapita	12.507	13.907	11.194
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.284	0,3	5.634

Sumber : BPS Tabalong, 2024

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.1.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Bagian ini menyajikan capaian kinerja dari berbagai sektor pemerintahan di Kabupaten Tabalong, mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial, lingkungan hidup, dan sektor strategis lainnya. Data yang disajikan menggambarkan tingkat pencapaian terhadap target yang ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan beberapa indikator menunjukkan hasil yang memuaskan, seperti partisipasi pendidikan dan pelayanan kesehatan ibu hamil. Namun, ada juga area yang

memerlukan perhatian lebih, seperti pengelolaan lingkungan hidup dan tingkat investasi daerah.

Tabel 2.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	95,420832	Disdikbud & Dukcapil	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,03895	Disdikbud & Dukcapil	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	91,215017	Disdikbud & Dukcapil	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	91,261261	Disdikbud & Dukcapil	
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	1,3667579	Dinkes & Dukcapil	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinkes	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Dinkes	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	99,774194	Dinkes	
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,354839	Dinkes	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	90,086788	Dinkes	
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,422559	Dinkes & Dukcapil	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	96,617489	Dinkes & Dukcapil	
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	83,596385	Dinkes & Dukcapil	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,04722	Dinkes	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,14603	Dinkes	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	83,152174	Dinkes	
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	60,609698	Dinkes	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	61,536075	Dinkes	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUPR	Tabalong tidak memiliki kewenangan Wilayah Sungai
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas PUPR	sda.
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	76,88101	Dinas PUPR	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	85,356273	Dinas PUPR	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	95,054995	Dinas PUPR	
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	100	Dinas PUPR	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	80,914296	Dinas PUPR	
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	82,706767	Dinas PUPR	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas PUPR	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	Disperkimtan	
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	Disperkimtan	
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	16,998935	Disperkimtan	
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	4,1380632	Disperkimtan	
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,0455259	Disperkimtan	
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP & Damkar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP & Damkar	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Satpol PP & Damkar	
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12,44	Satpol PP & Damkar	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinsos	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinsos	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	Disnaker	
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,2666951	Disnaker	
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	92.387.401.322,808	Disnaker & BPS	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	78,891258	Disnaker	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	43,763441	Disnaker	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	52,382001	Disnaker	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	100	DP3AP2KB	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	12,218684	DP3AP2KB & Dukcapil	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	373,08333	DKP2TPH	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	Disperkimtan	
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100	Disperkimtan	
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	0	Disperkimtan	Indikator ini merupakan Tusi dari DPMPSTP dan Dinas PUPR dan Tidak ada Permohonan Izin Membuka Tanah
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	45,565749	Disperkimtan	
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Disperkimtan	Indikator ini merupakan Tusi dari DPMPSTP dan Tidak ada Permohonan Izin Membuka Tanah
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Disperkimtan	
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73,98	DLH	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	90,723297	DLH	
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	9,3023256	DLH	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,746915	Disdukcapil	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	78,900714	Disdukcapil	
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	99,109357	Disdukcapil	
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	26,829268	Disdukcapil	
2.1.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	DPMD	Tidak ada Desa Tertinggal
2.1.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	20	DPMD	
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	308,3	DP3AP2KB	
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,605138	DP3AP2KB	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	4,7929407	DP3AP2KB	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,857	Dishub	
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,5052947	Dishub	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	Diskominfo	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	79,310345	Diskominfo	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	124,33687	Diskominfo	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	90	DiskopUKMPerindag	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasusaha	0,9854282	DiskopUKMPerindag	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-50,75152	DiskopUKMPerindag	
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,1443047	Diskeporapar	
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	117,18324	Diskeporapar	
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	4	Diskeporapar	

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Diskominfo	
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	Diskominfo	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	52,248062	Diskominfo	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	100	Disdikbud	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67,04	Dispusip	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	87,66	Dispusip	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	100	Dispusip	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	Dispusip	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	100,11191	DKP2TPH	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	4,5180723	Diskeporapar	
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	1,248704	Diskeporapar	
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	29,028233	Diskeporapar	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,4242354	Diskeporapar & BPS	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	25,153243	Diskeporapar	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun/Produktivitas pertanian per tahun	502,01222	DKP2TPH	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular/Persentase kasus zoonosis kab/ kota	29,220779	Disbunak	
3.d	Kehutanan		100	Sekretariat Daerah	Tabalung tidak memiliki kewenangan indikator ini
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	Sekretariat Daerah	Tabalung tidak memiliki kewenangan indikator ini

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	14,62585	DiskopUKMPerindag	
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	49,427211	DiskopUKMPerindag	
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86,50261	DiskopUKMPerindag	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	14,847591	DiskopUKMPerindag	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	DiskopUKMPerindag	
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DiskopUKMPerindag	
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DiskopUKMPerindag	Tidak ada Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan IPI
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	DiskopUKMPerindag	Tidak ada Perusahaan Industri Kecil dan Menengah yang mengajukan IUKI dan IPKI
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100	DiskopUKMPerindag	
3.h	Transmigrasi	Tidak Ada Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Sekretariat Daerah	Tabalong tidak memiliki kewenangan indikator ini

Sumber : Seluruh Perangkat Daerah yang Tercantum, 2024

2.1.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Bagian ini mencakup capaian kinerja berbagai fungsi penunjang di Kabupaten Tabalong, termasuk perencanaan dan keuangan, pengadaan, kepegawaian, manajemen keuangan, serta transparansi dan partisipasi publik. Beberapa indikator, seperti rasio belanja pegawai, opini laporan keuangan, dan rasio pengadaan kompetitif, memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan dan administrasi daerah. Beberapa area, seperti pengadaan produk dalam negeri dan peningkatan kompetensi pegawai fungsional, menunjukkan kemajuan yang signifikan, sementara indikator terkait proyek konstruksi dan pengelolaan aset masih memerlukan perhatian

lebih. Laporan ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk perbaikan sistem pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Berdasarkan Fungsi Penunjang

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,4973433	BPKAD	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	9,2814634	BPKAD	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	Inspektorat	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	52,437224	BPKAD	
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	BPKAD	
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bag. PBJ Sekretariat Daerah	Tidak ada proyek konstruksi multiyears
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	82,7157865	Bag. PBJ Sekretariat Daerah	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	74,6066558	Bag. PBJ Sekretariat Daerah & BPKAD	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	26,8565532	Bag. PBJ Sekretariat Daerah	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	76,96793	BKPSDM	
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	23,3965015	BKPSDM	
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKPSDM	
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	16,1130079	BPKAD	
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	6,8770823	BPKAD	
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	100	BPKAD	
4.d.4	Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	32,111343	BPKAD	
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	84,4346993	BPKAD	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100	BPKAD	

Sumber : Seluruh Perangkat Daerah yang Tercantum, 2024

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja;

Berdasarkan Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/034/2024 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/033/2020 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tabalong 2019-2024, telah ditetapkan 16 (Enam belas) sasaran dan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

Tujuan 1, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 1 indikator;
 Tujuan 2, dijabarkan kedalam 8 sasaran, dan 12 indikator;
 Tujuan 3, dijabarkan kedalam 6 sasaran, dan 9 indikator;
 Tujuan 4, dijabarkan kedalam 1 sasaran, dan 5 indikator.

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1	2	3	4
1.	Angka Kriminalitas	Persen	10,0
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	11,15
3.	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	Persen	100
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	79,80
5.	Indeks ketahanan pangan	Persen	84,72
6.	Persentase Penduduk berakses air minum	Indeks	74,99
7.	Indeks desa Membangun	Persen	0,70
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	72,80
9.	Persentase UKM Aktif	Indeks	82
10.	Persentase koperasi aktif	Persen	86
11.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,29
12.	Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	15,24
13.	Indeks Gini	Persen	0,28-0,31
14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	75,07
15.	Angka Harapan Hidup	Indeks	70,73
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	3,0-4,0
19.	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100
20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	75,12
21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,10
22.	Persentase Penduduk miskin	Indeks	5,55
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82
24.	Nilai SAKIP	Persen	A
25.	Opini BPK	Predikat	WTP
26.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	IKM	85
27.	Tingkat Kemandirian Daerah	Persen	17,17

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024 (diolah)

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja;

Tabel 2.5 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Terhadap Target Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian <small>((5/4)*100)</small>
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kriminalitas	Persen	10,0	0,02	0,20
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	11,15	7,76	69,60
3.	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	Persen	100	98,35	98,35
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	79,80	80,91	101,39
5.	Indeks ketahanan pangan	Persen	84,72	85,94	101,44
6.	Persentase Penduduk berakses air minum	Indeks	74,99	85,36	113,83
7.	Indeks desa Membangun	Persen	0,70	0,83	118,57
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	72,80	73,98	101,62
9.	Persentase UKM Aktif	Indeks	82	73,82	90,02
10.	Persentase koperasi aktif	Persen	86	53	61,63
11.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,29	7,61	49,77
12.	Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	15,24	5,96	39,11
13.	Indeks Gini	Persen	0,28-0,31	0,30	107,14
14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	75,07	75,97	101,20
15.	Angka Harapan Hidup	Indeks	70,73	74,76	105,70
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,15	92,15
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46	12,92	89,35
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	3,0-4,0	3,44	114,67
19.	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100,00
20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	75,12	72,54	96,57
21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,10	86,47	100,43
22.	Persentase Penduduk miskin	Indeks	5,55	5,64	101,62
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	80,76	98,49
24.	Nilai SAKIP	Persen	A	B	B
25.	Opini BPK	Predikat	WTP	Masih proses Audit	-
26.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	IKM	85	85,43	100,51
27.	Tingkat Kemandirian Daerah	Persen	17,17	8,60	50,09

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.5, Capaian realisasi kinerja indikator kinerja utama Kabupaten Tabalong tahun 2024 dibandingkan dengan target perjanjian kinerja menunjukkan variasi hasil, dengan beberapa indikator melampaui target yang ditetapkan, sementara beberapa lainnya masih berada di bawah ekspektasi.

Beberapa indikator utama yang menunjukkan pencapaian sangat baik adalah indeks desa membangun dengan capaian 118,57% dari target, tingkat pengangguran terbuka dengan capaian 114,67%, serta persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak yang mencapai 113,83% dari target. Selain itu, indeks ketahanan pangan (101,44%), indeks pembangunan manusia (101,20%), serta persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (101,39%) juga menunjukkan hasil yang melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya keberhasilan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, serta ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong.

Di sisi lain, beberapa indikator masih belum mencapai target yang diharapkan, terutama di sektor ekonomi. Kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB hanya mencapai 69,60% dari target, sementara kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB masing-masing hanya mencapai 49,77% dan 39,11% dari target. Selain itu, tingkat kemandirian daerah juga menjadi perhatian utama karena hanya mencapai 50,09% dari target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap sumber pendanaan eksternal.

Sementara itu, beberapa indikator sosial dan pembangunan manusia juga belum mencapai target secara optimal, seperti rata-rata lama sekolah (92,15%), harapan lama sekolah (89,35%), serta indeks pemberdayaan gender (96,57%). Selain itu, persentase UKM aktif hanya mencapai 90,02% dari target, dan persentase koperasi aktif bahkan hanya mencapai 61,63%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan usaha kecil dan menengah.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, indeks reformasi birokrasi hampir mencapai target dengan capaian 98,49%, sedangkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tetap berada pada predikat "B", belum mencapai target "A". Opini BPK masih dalam proses audit, sehingga belum dapat dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Namun, nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik mencapai 100,51% dari target, yang menunjukkan bahwa masyarakat cukup puas terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kabupaten Tabalong tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam beberapa aspek strategis, terutama dalam ketahanan pangan, pembangunan desa, infrastruktur jalan, serta pelayanan publik. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, terutama dalam meningkatkan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB, memperkuat daya saing UKM dan koperasi, serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terarah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki akses pendidikan, serta meningkatkan efektivitas program pemberdayaan gender guna mencapai target pembangunan yang lebih optimal di masa mendatang.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya;

Tabel 2.6 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian $\frac{(5-4)}{4 \times 100}$
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kriminalitas	Persen	10,5	0,02	-99,81
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	7,71	7,76	0,65
3.	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	Persen	98,35	98,35	0,00
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	80,59	80,91	0,40
5.	Indeks ketahanan pangan	Persen	79,79	85,94	7,71
6.	Persentase Penduduk berakses air minum	Indeks	82,41	85,36	3,58
7.	Indeks desa Membangun	Persen	0,78	0,83	6,41
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	74,03	73,98	-0,07
9.	Persentase UKM Aktif	Indeks	79	73,82	-6,56

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Capaian ((5-4)/4*100)
1	2	3	4	5	6
10.	Persentase koperasi aktif	Persen	59	53	-10,17
11.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	7,51	7,61	1,33
12.	Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	5,91	5,96	0,85
13.	Indeks Gini	Persen	0,284	0,30	5,63
14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	75,43	75,97	0,72
15.	Angka Harapan Hidup	Indeks	74,63	74,76	0,17
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,14	9,15	0,11
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,91	12,92	0,08
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	3,6	3,44	-4,44
19.	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	96,30	100	3,84
20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	74,60	72,54	-2,76
21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,06	86,47	0,48
22.	Persentase Penduduk miskin	Indeks	5,77	5,64	-2,25
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,53	80,76	4,17
24.	Nilai SAKIP	Persen	B	B	100
25.	Opini BPK	Predikat	WTP	Masih proses Audit	-
26.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	IKM	84,47	85,43	1,14
27.	Tingkat Kemandirian Daerah	Persen	11,13	8,60	-22,73

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024 (diolah)

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 2.6, perbandingan capaian realisasi kinerja indikator kinerja utama Kabupaten Tabalong tahun 2024 terhadap tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dalam beberapa aspek strategis, namun juga terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan.

Salah satu pencapaian yang sangat signifikan adalah penurunan angka kriminalitas yang mencapai -99,81%, dari 10,5% pada tahun 2023 menjadi hanya 0,02% pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan keberhasilan dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, indeks ketahanan pangan juga meningkat cukup tinggi sebesar 7,71%, mencerminkan perbaikan dalam ketersediaan dan akses terhadap pangan. Indikator lain yang mengalami peningkatan signifikan adalah indeks desa membangun (6,41%), persentase penduduk berakses air minum (3,58%), persentase PPKS yang dilayani (3,84%), dan indeks reformasi birokrasi (4,17%), yang menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pelayanan publik, pembangunan desa, serta ketahanan sosial.

Di sektor ekonomi, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB meningkat sebesar 0,65%, sementara sektor perdagangan dan industri masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,33% dan 0,85%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,72%, didukung oleh peningkatan angka harapan hidup (0,17%), rata-rata lama sekolah (0,11%), serta harapan lama sekolah (0,08%). Selain itu, indeks pembangunan gender (IPG) mengalami kenaikan sebesar 0,48%, mencerminkan adanya kemajuan dalam kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan.

Namun, di sisi lain, terdapat beberapa indikator yang mengalami penurunan. Persentase UKM aktif menurun sebesar -6,56%, sedangkan persentase koperasi aktif mengalami penurunan yang lebih signifikan, yakni -10,17%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan sektor usaha kecil dan menengah di tengah kondisi ekonomi yang mungkin kurang stabil. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan sebesar -4,44%, yang menunjukkan adanya peningkatan kesempatan kerja, meskipun perlu tetap diwaspadai agar tren ini dapat terus berlanjut.

Di sisi lingkungan, indeks kualitas lingkungan hidup mengalami sedikit penurunan sebesar -0,07%. Selain itu, indeks pemberdayaan gender (IDG) mengalami penurunan sebesar -2,76%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan peran aktif perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan sebesar -2,25%, menunjukkan adanya perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator yang perlu mendapatkan perhatian serius adalah tingkat kemandirian daerah yang mengalami penurunan drastis sebesar -22,73%, dari 11,13% pada tahun 2023 menjadi hanya 8,60% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan fiskal daerah terhadap sumber pendanaan eksternal masih tinggi, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan di berbagai sektor, terutama dalam aspek keamanan, ketahanan pangan, pembangunan manusia, serta reformasi birokrasi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu segera diatasi, terutama dalam hal penguatan sektor ekonomi, pemberdayaan usaha kecil dan koperasi, serta peningkatan kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, strategi pembangunan ke depan perlu difokuskan pada peningkatan daya saing ekonomi, penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, serta optimalisasi sumber pendapatan daerah guna mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah;

Tabel 2.7 Capaian Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Terhadap Target Akhir RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Capaian $\left(\frac{5}{4} \times 100\right)$
1	2	3	4	5	6
1.	Angka Kriminalitas	Persen	10,0	0,02	0,20
2.	Kontribusi pertanian terhadap PDRB	Persen	11,15	7,76	69,60
3.	Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah	Persen	100	98,35	98,35
4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen	79,80	80,91	101,39
5.	Indeks ketahanan pangan	Persen	91,25	85,94	94,18
6.	Persentase Penduduk berakses air minum	Indeks	74,99	85,36	113,83

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi 2024	Capaian ((5/4)*100)
1	2	3	4	5	6
7.	Indeks desa Membangun	Persen	0,70	0,83	118,57
8.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	72,80	73,98	101,62
9.	Persentase UKM Aktif	Indeks	82	73,82	90,02
10.	Persentase koperasi aktif	Persen	86	53	61,63
11.	Kontribusi perdagangan terhadap PDRB	Persen	15,29	7,61	49,77
12.	Kontribusi industri terhadap PDRB	Persen	15,24	5,96	39,11
13.	Indeks Gini	Persen	0,28-0,31	0,30	107,14
14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	75,07	75,97	101,20
15.	Angka Harapan Hidup	Indeks	70,73	74,76	105,70
16.	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,93	9,15	92,15
17.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,46	12,92	89,35
18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tahun	3,0-4,0	3,44	114,67
19.	Persentase PPKS yang dilayani	Persen	100	100	100,00
20.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persen	75,12	72,54	96,57
21.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,10	86,47	100,43
22.	Persentase Penduduk miskin	Indeks	5,55	5,64	101,62
23.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	82	80,76	98,49
24.	Nilai SAKIP	Persen	A	B	B
25.	Opini BPK	Predikat	WTP	Masih proses Audit	-
26.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik	IKM	85	85,43	100,51
27.	Tingkat Kemandirian Daerah	Persen	8,60	8,60	100,00

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024 (diolah)

Evaluasi capaian kinerja indikator utama Kabupaten Tabalong tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan, sementara yang lain masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Angka kriminalitas mengalami penurunan signifikan dengan realisasi 0,02% dibandingkan target 10,0%, mencerminkan peningkatan keamanan yang sangat baik. Persentase penduduk dengan akses air minum juga melampaui target dengan capaian 113,83%, menunjukkan keberhasilan dalam penyediaan infrastruktur air bersih. Selain itu, indeks desa membangun mencapai 118,57%, menandakan peningkatan kualitas pembangunan desa yang lebih baik dari target. Beberapa indikator lain yang juga melebihi target antara lain persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (101,39%), indeks kualitas lingkungan hidup (101,62%), indeks pembangunan manusia (IPM) (101,20%), serta angka harapan hidup (105,70%). Indeks Gini, yang mengukur ketimpangan pendapatan, berada dalam rentang yang diharapkan dengan capaian 107,14%, menandakan distribusi pendapatan yang semakin merata. Tingkat pengangguran terbuka juga mencatat capaian 114,67%, yang menunjukkan bahwa realisasi tingkat pengangguran masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan capaian yang hampir mencapai target, seperti persentase desa yang dapat diakses dengan mudah (98,35%), indeks ketahanan pangan (94,18%), dan indeks reformasi birokrasi (98,49%). Persentase penduduk miskin sedikit di atas target dengan capaian

101,62%, yang menunjukkan upaya pengentasan kemiskinan yang cukup efektif. Namun, terdapat beberapa indikator yang masih berada jauh di bawah target, seperti kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB yang hanya mencapai 69,60% dari target, serta kontribusi sektor perdagangan dan industri terhadap PDRB yang lebih rendah, masing-masing hanya mencapai 49,77% dan 39,11%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut belum berkembang sesuai dengan harapan dalam RPJMD, kemungkinan akibat faktor ekonomi global maupun lokal yang mempengaruhi investasi dan produksi. Persentase UKM aktif (90,02%) dan persentase koperasi aktif (61,63%) juga masih jauh dari target, menandakan perlunya dukungan lebih besar dalam pengembangan usaha kecil dan koperasi. Selain itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga belum mencapai target, dengan capaian masing-masing 92,15% dan 89,35%, yang menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tabalong.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Kabupaten Tabalong tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan banyak indikator yang telah memenuhi atau bahkan melampaui target RPJMD. Namun, masih terdapat tantangan dalam sektor ekonomi, terutama dalam kontribusi pertanian, industri, dan perdagangan terhadap PDRB, serta penguatan koperasi dan UKM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sektor ekonomi dengan meningkatkan investasi, diversifikasi usaha, serta program pendampingan bagi UKM dan koperasi. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan perlu terus diupayakan dengan memastikan akses pendidikan yang lebih merata dan meningkatkan program keahlian untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Optimalisasi infrastruktur dan layanan publik juga menjadi hal yang penting agar peningkatan akses air minum, kesehatan, dan pembangunan desa dapat terus dipertahankan dan diperluas cakupannya. Evaluasi kebijakan dan program RPJMD, terutama dalam sektor-sektor yang belum mencapai target, perlu dilakukan guna mengidentifikasi hambatan dan menyesuaikan strategi agar lebih efektif. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Tabalong dapat terus meningkatkan capaian kinerjanya dan mencapai pembangunan yang lebih berkelanjutan serta inklusif.

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai;

1. Angka Kriminalitas (Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat)

Tabel 2.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di masyarakat

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 27 orang sama dengan tahun sebelumnya	Masih dibutuhkannya 4 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan fungsional	Mengisi kekurangan jabatan fungsional yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk	Sarana prasarana yang mendukung saat ini	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
mendukung	belum cukup memadai		

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

2. Kontribusi pertanian terhadap PDRB dan Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan)

Tabel 2.9 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

Penggunaan Sumber Daya Manusia yang efisien menjadi prioritas dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPPTPH) Kabupaten Tabalong untuk mencapai sasaran – sasaran strategis pada tahun 2024. DKPPTPH pada tahun 2024 memiliki 130 (seratus tiga puluh) orang ASN terdiri dari 99 (sembilan puluh sembilan) orang PNS dan 31 (tiga puluh satu) orang PPPK. Selain ASN, pada DKPPTPH Kabupaten Tabalong tahun 2024 juga terdapat 55 (lima puluh lima) orang Tenaga Kontrak yang membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat, Bidang – Bidang dan UPT.

Jumlah PNS sebanyak 130 orang tersebut dirasakan masih kurang mencukupi dalam pelaksanaan tugas pekerjaan. Semua PNS yang ada telah melaksanakan rangkap pekerjaan sehari-hari baik yang sifatnya administratif maupun teknis agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. Sebagai SKPD teknis yang membidangi Ketahanan Pangan, Perikanan serta Tanaman Pangan dan Hortikultura maka DKPPTPH masih kekurangan pegawai. Semoga pada waktu yang akan datang Pemerintah Kabupaten Tabalong dapat menyediakan PNS tambahan untuk DKPPTPH agar kekurangan kebutuhan tenaga PNS tersebut dapat dipenuhi sehingga pelaksanaan tugas dapat dilakukan dengan lebih mudah dan ringan untuk mencapai sasaran – sasaran strategis.

3. Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah dan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten)

Tabel 2.10 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM Sesuai persyaratan jabatan dalam anjab (Jab.Struktural sebanyak 30 orang) dan (Jab. Pelaksana/Fungsional Umum sebanyak 80 orang).	Jumlah SDM sesuai jabatan struktural saat ini sebanyak 29 orang (ada 1 jabatan yg tanpa ada orangnya),dan Pelaksana/Fungsional Umum sebanyak 39	Mebutuhkan 3 orang SDM yang kompeten pada kelas jabatannya serta persyaratan jabatan yang sesuai untuk jab struktural.dan membutuhkan 34 orang SDM yang berkompeten pada kelas jabatannya untuk jab.pelaksana/fungsional umum.	Mengisi kekurangan/kekosongan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis dan non teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
Memadukan kegiatan kegiatan personalia dan tujuan organisasi diwaktu yang akan datang secara efektif dan efisien.	Masih ada kesenjangan personalia dengan kegiatan dan tujuan organisasi.	Mebutuhkan bimbingan dan arahan sikap dan perilaku dalam mempercepat pencapaian tujuan dan hasil kinerja.	pengembangan kompetensi yang bertujuan untuk membuat kinerja pegawai semakin meningkat,pengetahuan, keahlian,dan sikap/perilaku seiring dengan peningkatan kariernya.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung kinerja organisasi	Sarana dan prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana untuk penunjang operasional organisasi	Mengajukan usulan permintaan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

4. Indeks Ketahanan Pangan (Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah)

Tabel 2.11 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

5. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum)

Tabel 2.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum

Kondisi Ideal 1	Kondisi Saat Ini 2	Kekurangan/kelebihan 3	Tindak lanjut 4
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

6. Indeks Desa Membangun (Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa)

Tabel 2.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa

Kondisi Ideal 1	Kondisi Saat Ini 2	Kekurangan/kelebihan 3	Tindak lanjut 4
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 30 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 25 orang	Masih dibutuhkan 5 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan melakukan penerimaan CPNS
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan)

Tabel 2.14 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan

Kondisi Ideal 1	Kondisi Saat Ini 2	Kekurangan/kelebihan 3	Tindak lanjut 4
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 42 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 31 orang berkurang 9 orang dari tahun sebelumnya karena batas usia pensiun dan jabatan yang tidak terisi	Masih dibutuhkan 6 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

8. Persentase UKM Aktif, Persentase Koperasi Aktif, dan Kontribusi industry terhadap PDRB (Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi)

Tabel 2.15 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

9. Indeks Gini (Terkendalnya ketimpangan Pendapatan)

Tabel 2.16 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Terkendalnya ketimpangan Pendapatan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
SDM yang diperlukan sesuai persyaratan jabatan dalam analisis jabatan	Terdapat SDM yang belum sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan dalam pencapaian sasaran berkembangnya agribisnis terpadu yang berkelanjutan	Saat ini sumber dana belum mencukupi dalam pencapaian sasaran sehingga memerlukan biaya dari berbagai sumber baik APBN maupun APBD	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dan sasaran	Mengusulkan anggaran ke bagian anggaran / TAPD
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja yang mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional saat ini belum dapat dipergunakan secara optimal karena terbatasnya biaya operasional yang dibutuhkan	Perlu adanya dukungan dana untuk operasional	Membuat usulan biaya operasional

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

10. Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Budaya Serta Penerapan IPTEK Secara Optimal)

Tabel 2.17 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Budaya Serta Penerapan IPTEK Secara Optimal

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM sesuai Persyaratan Jabatan dalam Anjab	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

11. Tingkat Pengangguran Terbuka (Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal)

Tabel 2.18 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 46 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 34 orang bertambah 3 orang dari kondisi tahun sebelumnya sebanyak 31 orang	Masih dibutuhkan 12 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

12. Persentase PPKS yang di layani (Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial)

Tabel 2.19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM sesuai Persyaratan Jabatan dalam Anjab sebanyak 74 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 25 orang	Masih dibutuhkan 48 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
	memadai		
Sumber dana yang dapat menuntaskan semua permasalahan	Saat ini sumber dana dapat mencukupi penanganan masalah PMKS	Masih membutuhkan sumber dana/anggaran yang dapat mendukung tujuan dana dan sasaran dinas	Mengajukan usulan ke tingkat pusat baik melalui dana alokasi khusus ataupun APBN

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

13. Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) dan Indeks pembangunan Gender (IPG) (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Tabel 2.20 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 71 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 27 orang.	Masih dibutuhkan 44 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengusulkan untuk pengisian jabatan yang kosong dan mengusulkan untuk formasi pengangkatan ASN
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

14. Persentase Penduduk Miskin (Menurunnya Tingkat Kemiskinan)

Tabel 2.21 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM sesuai Persyaratan Jabatan dalam Anjab sebanyak 49 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini sebanyak 32 orang	Masih dibutuhkan 8 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan.
Tercukupinya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini masih belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

15. Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Opini BPK, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, dan Tingkat Kemandirian Daerah (Meningkatnya Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik)

Tabel 2.22 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terhadap Kinerja yang Dicapai dalam Meningkatkan Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/kelebihan	Tindak lanjut
1	2	3	4
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam anjab sebanyak 10 orang	Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan saat ini	Masih dibutuhkan 5 orang SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan
Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung	Sarana prasarana yang mendukung saat ini belum cukup memadai	Masih membutuhkan sarana dan prasarana	Mengajukan usulan pengadaan barang

Sumber : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong 2024

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

1. Angka Kriminalitas (Meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan di Masyarakat)

Untuk menekan laju angka kriminalitas di kabupaten Tabalong didukung dengan 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkara melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
 - 2) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum.
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia.
 - 4) Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum
- Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1) Sosialisasi Penegakan Perda Dan Peraturan Bupati/Wali kota.
 - 2) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Bupati / Wali Kota.
 - 3) Penanganan atas pelanggaran perda dan perbup.

- b) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kegiatan :
 - Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam daerah Kabupaten/kota
 - Inspeksi peralatan proteksi kebakaran
 - 1) Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran.

2. Kontribusi pertanian terhadap PDRB dan Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan)

Dalam upaya pencapaian sasaran Berkembangnya Agribisnis Terpadu yang Berkelanjutan, didukung oleh 15 (lima belas) program dan 26 (dua puluh enam) kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain
- b) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - Pengembangan prasarana pertanian
 - Pembangunan prasarana pertanian
- c) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
 - Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
- d) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan :
 - a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Kabupaten/Kota
- e) Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan :
 - Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaten/Kota
- f) Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- g) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan :
 - Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota
 - Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten / Kota
- h) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan :
 - Pemberdayaan pembudidaya ikan kecil

- Pengelolaan pembudidayaan ikan
 - i) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan kegiatan :
 - Pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota
 - j) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dengan kegiatan:
 - Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota
 - k) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan:
 - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
 - l) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan:
 - Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
 - m) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan:
 - Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
 - Penerbitan tanda daftar gudang
 - Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat
 - n) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan:
 - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
 - o) Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan:
 - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
3. Persentase desa yang bisa di akses dengan mudah dan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (Meningkatnya Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten)

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Akses Mobilitas dan Kualitas Jalan yang Menghubungkan seluruh Wilayah Kabupaten, yaitu melalui Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

4. Indeks Ketahanan Pangan (Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah)

Dalam upaya pencapaian target indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong, didukung oleh 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan:
 - Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota, meliputi sub kegiatan : penyediaan infrastruktur lumbung pangan; dan penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya.
- b) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
 - Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan
- c) Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan :
 - Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
- d) Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota.

5. Persentase Penduduk Berakses Air Minum (Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Air Minum)

Dalam upaya pencapaian target persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong melaksanakan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, melalui kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota.

6. Indeks Desa Membangun (Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa)

- a) Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- b) Program Penataan Desa
 - Penyelenggaraan Penataan Desa
- c) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.
 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- d) Program Peningkatan Kerjasama Desa

- Fasilitasi Kerjasama antar Desa

Program dan kegiatan di atas telah menyesuaikan dengan analisis cascading perangkat daerah.

7. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan)

Untuk mencapai tujuan dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) didukung oleh 9 (Sembilan) program dan 11 (sebelas) kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- b) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- c) Program Pengelolaan Keaneragaman Hayati (kehati)
 - Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- d) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3):
 - Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
- e) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH :
 - Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran
- f) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
 - Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
- g) Program Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota
- h) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - Kegiatan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- i) Program Pengelolaan Persampahan.
 - Pengelolaan Sampah

Dari 9 (sembilan) Program dan 11 (sebelas) kegiatan tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong bahwanya program dan kegiatan tersebut sesuai dengan analisis cascading yang telah di lakukan sesuai dari tahun lalu.

8. Persentase UKM Aktif, Persentase Koperasi Aktif, dan Kontribusi industry

terhadap PDRB (Meningkatnya Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi)

Dalam upaya pencapaian sasaran Meningkatkan Pertumbuhan di Sektor Industri Kecil, Menengah dan Koperasi di Kabupaten Tabalong dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tabalong dengan program sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- b) Program Pengembangan UMKM
- c) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota
- d) Program Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi d3
- e) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- f) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- g) Program perencanaan dan Pembangunan Industri
- h) Program pengendalian izin usaha industry kabupaten kota.

9. Indeks Gini (Terkendalinya ketimpangan Pendapatan)

Dalam upaya pencapaian sasaran Terkendalinya Ketimpangan Pendapatan, didukung oleh 6 (enam) program dan 12 (dua belas) kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan:
 - Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya
- b) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan kegiatan:
 - Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan
- c) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, dengan kegiatan :
 - Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan
 - Penerbitan tanda daftar gudang
 - Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat
- d) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
 - Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah Kabupaten/ Kota
 - Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
- e) Program Pengembangan Ekspor, dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.
- f) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah

- Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
- Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
- Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

10. Angka Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah (Meningkatnya Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan Dan Sosial Budaya Serta Penerapan IPTEK Secara Optimal)

Dalam upaya pencapaian Sasaran “Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Sosial Budaya serta Penerapan IPTEK secara Optimal”, di dukung oleh 7 (tujuh) program dan 18 (delapan belas) kegiatan sebagai berikut:

- a) Program Pengelolaan Pendidikan
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- b) Program Pengembangan Kebudayaan
 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten / Kota
- c) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten / Kota
- d) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- e) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- f) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah

Tangga

- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - g) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Program dan kegiatan di atas telah menyesuaikan dengan analisis cascading perangkat daerah.

11. Tingkat Pengangguran Terbuka (Meningkatnya Kesempatan Kerja Terutama Bagi Penduduk Lokal)

Dalam mencapai target kinerja di atas di dukung oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan yang mendukung dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka sebagai berikut :

- a) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
 - Kegiatan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
 - Kegiatan perluasan dan pengembangan kesempatan kerja
- b) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
 - Kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
 - Kegiatan peningkatan pelatihan kepada masyarakat
 - Kegiatan peningkatan produktivitas

Persentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 meningkat menjadi 3,43 persen dan 4,46 persen dan pada tahun 2023 ini kembali turun menjadi 3,60 persen sedangkan tahun 2024 menjadi 3,44 persen.

Pada tahun 2024 angka pengangguran menurun dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 6.219 jiwa pada tahun 2023 menjadi 5.052 pada 2024 menjadi 5.000 orang.

12. Persentase PPKS yang di layani (Meningkatnya Kualitas Dan Jangkauan Pelayanan Sosial)

Dalam mendukung sasaran kinerja di atas, dilaksanakan 1 (satu) program dan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung dalam Persentase PPKS yang Mandiri sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan peningkatan Pemberdayaan PSKS
 - Kegiatan peningkatan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat
 - Kegiatan peningkatan penanganan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan restorasi sosial dan pengelolaan sumber dana sosial

Analisis terhadap program dan kegiatan di atas untuk dapat merampingkan program yang harus di laksanakan 1 (satu) orang pejabat eselon III dan 1 (satu) orang untuk kegiatan pejabat subkoordinator, agar nantinya kegiatan yang tujuannya sama bisa di gabung, atau kegiatan

yang tidak relevan lagi di hapus, sesuai dengan analisis cascading Perangkat Daerah.

13. Indeks Pemberdayaan Genders (IDG) dan Indeks pembangunan Gender (IPG) (Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Untuk mencapai tujuan dari Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) didukung oleh 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :

- a) Program Pemberdayaan Perempuan yang Berkeadilan Gender:
 - Kegiatan Peningkatan kualitas hidup perempuan dalam bidang ekonomi
 - Peningkatan kualitas hidup perempuan bidang sosial, politik dan hukum
 - Peningkatan kualitas keluarga dan sistem data informasi
 - b) Program Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak:
 - Kegiatan Peningkatan pemenuhan hak anak
 - Kegiatan Pelayanan pengaduan bagi perempuan dan anak
 - Kegiatan Peningkatan perlindungan hak perempuan
- Program dan kegiatan di atas telah sesuai dengan analisis cascading Perangkat Daerah.

14. Persentase Penduduk Miskin (Menurunnya Tingkat Kemiskinan)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait mewujudkan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 , sebanyak 3 (Tiga) program dengan 11 (Sebelas) kegiatan yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini yaitu:

- a) Program Perumahan Rakyat dan PSU Perumahan
 - Kegiatan perencanaan dan pendataan perumahan
 - Kegiatan penyediaan dan pelaksanaan perumahan
- b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
 - Kegiatan Perlindungan sosial, bencana alam dan bencana sosial
 - Kegiatan Jaminan sosial keluarga
 - Kegiatan Penanganan fakir miskin perkotaan dan pedesaan
- c) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
 - Kegiatan Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar
 - Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi tuna social
 - Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi wanita rawan sosial ekonomi
 - Peningkatan pelayanan lansia kurang mampu
 - Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma

15. Indeks Reformasi Birokrasi, Nilai SAKIP, Opini BPK, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik, dan Tingkat Kemandirian Daerah (Meningkatnya Pengelolaan Dan Kinerja Pemerintah Daerah Serta Kualitas Pelayanan Publik)

Analisa program dan kegiatan yang ingin di capai dalam sasaran

Meningkatnya pengelolaan dan kinerja pemerintah daerah serta kualitas pelayanan publik yaitu indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, Predikat SAKIP, Opini BPK, Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik dan Tingkat Kemandirian Daerah pada tahun 2024 , dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

- a) Program pengelolaan penganggaran keuangan daerah
 - Penyusunan rencana anggaran daerah
 - Pelaksanaan evaluasi anggaran daerah
 - Pengelolaan data informasi daerah
- b) Program pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan daerah.
 - Pengelolaan belanja daerah
 - Pengelolaan administrasi perbendaharaan belanja pegawai
 - Pengelolaan kas daerah
- c) Program peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah
 - Rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan daerah
 - Analisa dan pengolahan sistem Akuntansi SKPD dan SKPKD
 - Penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
- d) Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Aparatur
 - Kegiatan Penguatan Sakip Kabupaten Tabalong
- e) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
 - Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
 - Kegiatan Pelaksanaan SATGAS sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
 - Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
 - Kegiatan pengawasan/monitoring pemotongan dan penyetoran pajak dan retribusi
 - Kegiatan Penyelenggaraan TPTGR
 - Kegiatan Pelaksanaan pengawasan non PKPT
 - Kegiatan Sinergitas pengawalan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah
 - Kegiatan unit laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara
 - Kegiatan Unit pengendali gratifikasi
 - Kegiatan Koordinasi/supervisi pencegahan korupsi daerah.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN

TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Dinas Tenaga Kerja atau dalam hal ini UPTD BLK Tanjung dari Kementerian Ketenagakerjaan berdasarkan dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan sebagai berikut Peraturan Presiden no. 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN dan Peraturan Presiden no. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Ketenagakerja Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian ketenagakerjaan..

3.1.1 Target Kinerja

Target kinerja dalam pelaksanaan penugasan oleh Dinas Tenaga Kerja atau dalam hal ini UPTD BLK Tanjung Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 190/PMK-05/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

3.1.2 Realisasi

Berikut adalah tabel Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong, yang disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan penugasan dari Kementerian/Lembaga. Tabel ini mencakup berbagai program prioritas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor kesehatan, serta untuk memastikan bahwa anggaran yang disalurkan dapat memberikan dampak positif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tabalong

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kementerian Ketenagakerjaan	PMK no. 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi Kegiatan : Pelatihan Berbasis Kompetensi Output :	Kabupaten Tabalong	Dinas Tenaga Kerja UPTD BLK Tanjung	982.124.000	929.973.915	95%	10 Paket	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pencari Kerja Terlatih Rincian Kegiatan : Pelatihan								

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan Provinsi Kalimantan Selatan.

3.2.1 Target Kinerja

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan Provinsi Kalimantan Selatan

3.2.2 Realisasi

Kabupaten Tabalong tidak ada mendapat dan/atau melaksanakan tugas pembantuan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Tabalong.

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	Perangkat Daerah Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3 Permasalahan dan Kendala

Dinas Tenaga Kerja atau dalam hal ini UPTD BLK Tanjung menghadapi beberapa permasalahan, yaitu:

1. Permasalahan pada jumlah instruktur yang masih kurang pada beberapa kejuruan menyebabkan peserta yang diterima terbatas, yang mana jumlah pendaftar sangat banyak
2. Kendala yang dihadapi kurangnya peralatan pada UPTD BLK Tanjung pada beberapa kejuruan,
3. Tidak adanya staf khusus yang menangani masalah keuangan pada saat pelaksanaan teknis kegiatan
4. Seringnya peserta pelatihan berhenti di tengah-tengah pelatihan sedang berlangsung dengan berbagai alasan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Dinas Tenaga Kerja atau dalam hal ini UPTD BLK Tanjung merumuskan beberapa tindak lanjut untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan, yaitu:

1. Adanya penambahan instruktur pada UPTD BLK Tanjung
2. Bantuan penambahan alat untuk kelancaran pelatihan
3. Serta mengingatnya banyaknya pendaftar yang berminat untuk

mengikuti pelatihan agar dapat dipertimbangkan untuk menambah paket pelatihan pada dana pembantuan ke depan

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Surat Mendikbudristek Nomor 5676/MPK.A/PR.07.05/2023 disampaikan kepada Kepala Daerah pada tanggal 18 Februari 2023 Perihal “Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Delapan indikator prioritas kabupaten/kota adalah (1) Angka Partisipasi Sekolah; (2) Kompetensi Literasi; (3) Kompetensi Numerasi; (4) Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B ; (5) Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV; (6) Iklim Keamanan; (7) Iklim Kebinekaan; dan (8) Iklim Inklusivitas.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

1. Angka Partisipasi Sekolah

a. APS PAUD

Tabel 4.1 Target Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun dalam Pendidikan PAUD

		TARGET
B.10 Indikator PAUD Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

b. APS Pendidikan Dasar

Tabel 4.2 Target Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun dalam Pendidikan Dasar

		TARGET
B.13 Indikator Dasmen Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

c. APS Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.3 Target Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan

		TARGET
B.15 Indikator Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (*)	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022:	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

2. Kemampuan Literasi

Tabel 4.4 Target Rata-rata Kemampuan Literasi Siswa Berdasarkan Asesmen Nasional

		TARGET
A.1 Kemampuan Literasi	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Rata-rata kemampuan literasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional 	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

3. Kemampuan Numerasi

Tabel 4.5 Target Rata-rata Kemampuan Numerasi Siswa Berdasarkan Asesmen Nasional

		TARGET
A.2 Kemampuan Numerasi	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Rata-rata kemampuan numerasi siswa berdasarkan asesmen nasional (pada jenis pelayanan dasar: pendidikan dasar)	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional • Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional 	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B

Tabel 4.6 Target Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B

		TARGET
B.8 Indikator PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Data Hasil Akreditasi PAUD PNF (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

5. Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV

Tabel 4.7 Target Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

		TARGET
C.1 Indikator PAUD Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: Pertumbuhan Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Data Pokok Pendidikan (Kementerian, Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

6. Iklim Keamanan

Tabel 4.8 Target Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan

		TARGET
D.4 Indikator Dasmen Iklim Keamanan	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Indeks Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Iklim Keamanan SD • Indeks Iklim Keamanan SMP 	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

7. Iklim Kebinekaan

Tabel 4.9 Target Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan

		TARGET
D.8 Iklim Kebinekaan	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Indeks Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Iklim Kebinekaan SD • Indeks Iklim Kebinekaan SMP 	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

8. Iklim Inklusivitas

Tabel 4.10 Target Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan

		TARGET
D.10 Iklim Inklusivitas	NAMA INDIKATOR BERDASARKAN PERMENDAGRI 59 TAHUN 2021: Indeks Iklim Inklusivitas di Satuan Pendidikan	100%
	INDIKATOR BERDASARKAN KEPMENDIKBUDRISTEK 311 TAHUN 2022: <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Iklim Inklusivitas SD • Indeks Iklim Inklusivitas SMP 	
	SUMBER DATA INDIKATOR RAPOR PENDIDIKAN: Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi)	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4.1.3 Realisasi

1. Angka Partisipasi Sekolah

a. APS PAUD

Tabel 4.11 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun pada Pendidikan PAUD

		REALISASI	
B.10 Indikator PAUD Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8.877	95,42%
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	9.303	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

b. APS Pendidikan Dasar

Tabel 4.12 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 Tahun pada Pendidikan Dasar

		REALISASI	
B.13 Indikator Dasmen Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-15 tahun	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	42.830	97,75%
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	43.814	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

c. APS Pendidikan Kesetaraan

Tabel 4.13 Realisasi Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Tabalong

		REALISASI	
B.15 Indikator Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (*)	1.013	91,26%
	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Kabupaten Tabalong	1.110	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

2. Kemampuan Literasi

Tabel 4.14 Capaian Skor Kemampuan Literasi Berdasarkan Asesmen Nasional

		CAPAIAN	SKOR
A.1 Kemampuan Literasi	Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Baik	71,81
	Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Baik	77,15

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

3. Kemampuan Numerasi

Tabel 4.15 Capaian Skor Kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional

		CAPAIAN	SKOR
A.2 Kemampuan Numerasi	Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Sedang	60,86
	Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) berdasarkan Asesmen Nasional	Baik	70,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4. Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B

Tabel 4.16 Realisasi Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B

		REALISASI
B.8 Indikator PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	32,88%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

5. Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV

Tabel 4.17 Realisasi Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

		REALISASI	
C.1 Indikator PAUD Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1 / D4	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	771	68,35%
	Jumlah Pendidik PAUD	1.128	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

6. Iklim Keamanan

Tabel 4.18 Capaian Skor Indeks Iklim Keamanan Berdasarkan Asesmen Nasional

		CAPAIAN	SKOR
D.4 Indikator Dasmen Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan SD	Baik	71,32
	Indeks Iklim Keamanan SMP	Baik	72,34

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

7. Iklim Kebinekaan

Tabel 4.19 Capaian Skor Indeks Iklim Kebinekaan Berdasarkan Asesmen Nasional

		CAPAIAN	SKOR
D.8 Iklim Kebinekaan	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Baik	71,50
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Baik	74,54

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

8. Iklim Inklusivitas

Tabel 4.20 Capaian Skor Indeks Iklim Inklusivitas Berdasarkan Asesmen Nasional

		CAPAIAN	SKOR
D.10 Iklim Inklusivitas	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Baik	54,34
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Baik	58,07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4.1.4 Alokasi Anggaran

Untuk mendukung tercapainya SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tabalong alokasi anggaran untuk urusan pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21 Alokasi Anggaran Urusan Pendidikan APBD-P TA. 2024

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Belanja Operasi	444.544.317.216
	Belanja Pegawai	359.820.868.000
	Belanja Barang dan Jasa	75.225.649.216
	Belanja Hibah	9.497.800.000
2	Belanja Modal	66.832.499.157
	Belanja Modal Tanah	2.119.730.000
	Belanja Peralatan dan Mesin	12.226.574.247
	Belanja Modal Gedung & Bangunan	47.344.493.814
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.960.856.048
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.180.845.048
	TOTAL	511.376.816.373

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

Adapun rincian total APBDP, total anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong, serta persentase tahun 2024.

Tabel 4.22 Total APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Tahun	Perbandingan Anggaran APBD dan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong		
	Total APBDP (Rp)	Total Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase (%)
1	2	3	4
2024	3.615.864.590.904	511.376.816.373	14,14

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam Upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber daya Manusia (SDM) yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	2	3	4	5
1	Golongan IV	46	17	63
2	Golongan III	18	11	29
3	Golongan II	4	2	6
4	Golongan I	-	-	-
	TOTAL	68	30	98

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.24 Komposisi Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Pendidikan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1	2	3	4	5
1	SD	0	0	0
2	SMP	1	0	1
3	SLTA	2	2	4
4	Diploma	2	0	2
5	Sarjana (S1)	46	27	73
6	Megister (S2)	17	1	18
7	Doktor (S3)	0	0	0
	TOTAL	68	30	98

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.25 Persentase Guru TK yang Memenuhi kualifikasi S1/D.IV Tahun 2023/2024

No	Kecamatan	Jumlah Guru TK/RA/PAUD/BA Berijazah kualifikasi	Jumlah Seluruh Guru TK/RA	Persentase Guru TK/RA/PAUD/BA Yang Memenuhi
1	2	3	4	5
1	Kec. Banua Lawas	73	98	74,49
2	Kec. Bintang Ara	27	29	93,10
3	Kec. Haruai	76	106	71,70
4	Kec. Jaro	41	45	91,11
5	Kec. Kelua	118	124	95,16
6	Kec. Muara Harus	24	32	75,00
7	Kec. Muara Uya	74	81	91,36
8	Kec. Murung Pudak	201	318	63,21
9	Kec. Pugaan	30	40	75,00
10	Kec. Tanjung	113	150	75,33
11	Kec. Tanta	46	72	63,89
12	Kec. Upau	17	33	51,52
	TOTAL	771	1.128	68,35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.26 Persentase Guru SD/MI yang Memenuhi kualifikasi S1/D.IV Tahun 2023/2024

No	Kecamatan	Jumlah Guru SD/MI Berijazah kualifikasi	Jumlah Seluruh Guru SD/MI	Persentase Guru SD/MI Yang Memenuhi
1	2	3	4	5
1	Kec. Banua Lawas	235	244	96,31
2	Kec. Bintang Ara	133	152	87,50
3	Kec. Haruai	277	286	96,85
4	Kec. Jaro	160	171	93,57
5	Kec. Kelua	264	272	97,06
6	Kec. Muara Harus	84	89	94,38
7	Kec. Muara Uya	207	226	91,59
8	Kec. Murung Pudak	467	515	90,68
9	Kec. Pugaan	98	102	96,08

No	Kecamatan	Jumlah Guru SD/MI Berijazah kualifikasi	Jumlah Seluruh Guru SD/MI	Persentase Guru SD/MI Yang Memenuhi
1	2	3	4	5
10	Kec. Tanjung	416	432	96,30
11	Kec. Tanta	274	322	85,09
12	Kec. Upau	83	89	93,26
	TOTAL	2.698	2.900	93,03

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.27 Persentase Guru SMP/MTs yang Memenuhi kualifikasi S1/D.IV Tahun 2023/2024

No	Kecamatan	Jumlah Guru SD/MI Berijazah kualifikasi	Jumlah Seluruh Guru SD/MI	Persentase Guru SD/MI Yang Memenuhi
1	2	3	4	5
1	Kec. Banua Lawas	95	96	98,96
2	Kec. Bintang Ara	64	81	79,01
3	Kec. Haruai	130	136	95,59
4	Kec. Jaro	85	94	90,43
5	Kec. Kelua	140	138	101,45
6	Kec. Muara Harus	51	52	98,08
7	Kec. Muara Uya	123	126	97,62
8	Kec. Murung Pudak	205	227	90,31
9	Kec. Pugaan	49	48	102,08
10	Kec. Tanjung	259	269	96,28
11	Kec. Tanta	97	104	93,27
12	Kec. Upau	58	62	93,55
	TOTAL	1.356	1.433	94,63

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Penentuan target tidak didasarkan pada baseline data yang akurat sehingga target layanan 100% sulit untuk tercapai.
- b. Indikator SPM belum digunakan sebagai dasar perencanaan program. Perencanaan program masih berdasarkan kebutuhan rutin penyediaan pelayanan dan tidak berdasarkan target SPM yang didukung dengan indikator yang terukur sehingga kinerja SPM tidak dapat dinilai.
- c. Indikator SPM masih sulit untuk masuk ke dalam dokumen RPJMD/Renstra, karena timing yang tidak tepat. Contohnya RPJMD/Renstra telah berjalan sedangkan SPM baru disusun. Selain itu jenis indikator pelayanan dengan indikator perencanaan berbeda dan membutuhkan sinkronisasi.
- d. Berkenaan dana pendidikan yang berasal dari APBD, masih banyak pemerintah daerah yang belum kuat menunjukkan keberpihakan pada biaya pendidikan. Walaupun jumlah 20 persen APBD untuk

pendidikan, masih ada perdebatan apakah gaji termasuk atau tidak. Kenyataan menunjukkan besaran anggaran APBD untuk pendidikan masih jauh dari harapan.

2. Solusi

- a. Pemanfaatan data yang sudah mengintegrasikan data Pendidikan dengan data penduduk pada aplikasi SPM yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas, dan meningkatkan akses
- c. pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi; menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah dan antar jenis kelamin dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu; serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat
- d. Pendekatan alternatif untuk pembiayaan diperlukan, seperti perhitungan BOSP yang dirancang untuk mengestimasi total biaya operasional di tingkat sekolah, termasuk pendanaan yang diperlukan untuk biaya operasional pendidikan.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, ditetapkan 12 jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Sebagaimana disebutkan dalam PerMenKes Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pasal 3, capaian kinerja Pemerintah

Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan harus 100%. Berikut adalah target SPM Kesehatan Kabupaten Tabalong tahun 2024.

Tabel 4.28 Target Capaian Kinerja SPM Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Target Capaian Kinerja
		Perhitungan	Jumlah	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang ditemukan dilapangan	3.561	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang ditemukan dilapangan	3.100	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang ditemukan dilapangan	3.100	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang ditemukan dilapangan	18.551	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-15 tahun berdasarkan data Dukcapil	43.561	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada usia lansia	Jumlah penduduk usia ≥ 60 tahun berdasarkan data Dukcapil	19.000	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Jumlah penduduk usia 15 – 59 tahun berdasarkan data Dukcapil	173.120	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang ditemukan dilapangan	16.943	100%
9	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang ditemukan dilapangan	3.424	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah ODGJ yang ditemukan dilapangan	368	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah orang terduga TBC yang ditemukan dilapangan	4.166	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran		Target Capaian Kinerja
		Perhitungan	Jumlah	
1	2	3	4	5
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang ditemukan dilapangan	6.445	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2024

4.2.3 Realisasi

Pemerintah wajib memenuhi standar mutu pelayanan setiap pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Mutu Pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan terdiri atas:

1. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
2. Standar jumlah dan kualitas personel/sumber data manusia kesehatan; dan
3. Capaian kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja setiap jenis pelayanan dasar dalam SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam tabel.

Tabel 4.29 Capaian Pelaksanaan Untuk Pelayanan Dasar Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar			Pendanaan			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.561	3.561	100,00	608.110.926	531.756.400	87,44	APBD
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3100	3.093	99,77	255.464.552	229.786.000	89,95	APBD
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.100	2.987	96,35	334.867.656	160.780.200	48,01	APBD
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18.551	16.712	90,09	173.109.920	153.932.348	88,92	APBD
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	43.561	43.561	100,00	896.907.034	833.252.000	92,90	APBD
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	173.120	171.383	99,00	92.712.000	76.644.000	82,67	APBD
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	19.000	18.591	97,85	148.865.325	136.930.000	91,98	APBD
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.943	16.951	100,05	73.952.000	56.712.200	76,69	APBD
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.424	3.429	100,15	339.332.000	283.251.200	83,47	APBD
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	368	306	83,15	18.436.000	10.460.000	56,74	APBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar			Pendanaan			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gangguan Jiwa Berat							
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.166	2.525	60,61	490.716.192	451.678.200	92,04	APBD
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.445	3.966	61,54	125.707.000	75.912.400	60,39	APBD

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.30 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM Kab./Kota)	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM	Kategori
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3561	3561	80,00	677447	676282	19,44	99,44	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	3100	3093	79,82	14146	14146	20,00	99,82	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3100	2987	77,08	21604	17686	18,38	95,46	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18551	16712	72,07	232554	175548	17,62	89,69	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	43561	43561	80,00	168498	162613	19,55	99,55	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	173120	171383	79,20	5047	4241	19,68	98,88	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	19000	18591	78,28	53906	34652	17,99	96,27	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16943	16951	80,04	6099732	88893	18,36	98,40	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3424	3429	80,12	246863	33774	17,84	97,96	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	368	306	66,52	392	392	20,00	86,52	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	4166	2525	48,49	6527	8035	19,77	68,26	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6445	3966	49,23	11115	14442	20,00	69,23	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2024

4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2024 di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Tabalong dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.31 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Kegiatan	Anggaran	
		Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	608.110.926	531.756.400
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	255.464.552	229.786.000
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	334.867.656	160.780.200
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	173.109.920	153.932.348
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	896.907.034	833.252.000
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	92.712.000	76.644.000
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	148.865.325	136.930.000
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	73.952.000	56.712.200
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	339.332.000	283.251.200
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	18.436.000	10.460.000
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	490.716.192	451.678.200
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	125.707.000	75.912.400
	TOTAL	3.558.180.605	3.001.094.948

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2024

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 terdiri dari dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, tenaga teknis kefarmasian, apoteker, sanitarian, nutrisisionis, laboratorium, fisioterapi, kesehatan masyarakat dan lainnya.

Selain tenaga kesehatan berstatus PNS, di Puskesmas se-Kabupaten Tabalong juga ada tenaga kesehatan berstatus PTT Kabupaten dan PTT Provinsi yang terdiri dari profesi dokter umum, dokter gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, bidan, perawat, radiografer, kesehatan lingkungan, perawat gigi, ahli gizi dan kesehatan masyarakat.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.32 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Terdapat beberapa ibu hamil yang tidak berkunjung ke Puskesmas untuk memeriksakan diri pada trimester ke 3 sehingga standar kuantitas K4 tidak dapat terpenuhi untuk semua sasaran ibu hamil	<ol style="list-style-type: none"> Memperbaiki perencanaan di Dinas Kesehatan sehingga upaya pencapaian target SPM harus dijadikan dasar utama dalam perencanaan kegiatan, baru kemudian kegiatan lainnya. Meningkatkan kapasitas petugas perencana di Dinas Kesehatan tentang perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan capaian kinerja SPM Kesehatan. Mewajibkan Klinik/dokter praktik swasta/Rumah Sakit Swasta/Bidan Praktek Mandiri untuk melaporkan kegiatan pelayanan yang mereka lakukan secara rutin. Mengusulkan penambahan tenaga melalui ABK Mengusulkan penambahan anggaran serta sarana dan prasarana baik melalui APBD maupun DAK Melakukan pendekatan dengan masyarakat agar lebih memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Terdapat beberapa ibu bersalin yang tidak melakukan persalinan di fasilitas kesehatan atau dibantu oleh tenaga kesehatan	
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Masih ada masyarakat yang kurang memahami pentingnya pemeriksaan lanjutan untuk bayi baru lahir	
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	- Tidak semua balita mendapat pelayanan penimbangan minimal 8 kali dalam setahun - Beberapa balita tidak melakukan imunisasi lanjutan - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada beberapa Puskesmas masih rendah dikarenakan penolakan dari masyarakat	
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	- Keterbatasan sumber daya dan waktu sehingga belum semua sasaran dapat dilakukan screening - Sasaran yang terdapat di Klinik swasta, Rumah sakit swasta dan Rumah sakit Umum Daerah masih ada yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan.	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	- Keterbatasan sumber daya dan waktu sehingga belum semua sasaran dapat dilakukan screening - Sasaran yang terdapat di Klinik swasta, Rumah sakit swasta dan Rumah sakit Umum Daerah masih ada yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan.	
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	- Keterbatasan sumber daya dan waktu sehingga belum semua sasaran dapat dilakukan screening serta kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri di Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya - Sasaran yang terdapat di Klinik swasta, Rumah sakit swasta dan Rumah sakit Umum Daerah masih ada yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan.	
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Keterbatasan sumber daya dan waktu sehingga belum semua sasaran dapat dilakukan screening - Sasaran yang terdapat di Klinik swasta, Rumah sakit swasta dan Rumah sakit Umum Daerah masih ada yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan.	
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Keterbatasan sumber daya dan waktu sehingga belum semua sasaran dapat dilakukan screening - Sasaran yang terdapat di Klinik	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	2	3	4
		swasta, Rumah sakit swasta dan Rumah sakit Umum Daerah masih ada yang belum melaporkan ke Dinas Kesehatan.	
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	- Keterbatasan sumber daya sesuai standar dan waktu sehingga kurang maksimal dalam pelayanan ODGJ	
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	- Rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki ciri-ciri menderita Tuberculosis untuk memeriksakan diri ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya - Belum maksimalnya pelaporan dari Klinik swasta, dokter praktik mandiri, dan rumah sakit swasta	
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	- Rendahnya kesadaran masyarakat dengan risiko terinfeksi HIV untuk memeriksakan diri ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya - Belum maksimalnya pelaporan dari Klinik swasta, dokter praktik mandiri, dan rumah sakit swasta	

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tabalong, 2024

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sudah menjadi tugas pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menyediakan fasilitas pelayanan dasar bagi warganya. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 , bahwa jenis pelayanan dasar untuk kabupaten/kota terdiri atas 28 (dua puluh delapan) jenis. Di antaranya yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong yaitu :

4. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
5. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Berdasarkan peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa yang dimaksud Standar Pelayanan Minimal sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani

- melalui sistem penyediaan air minum;
2. Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka ada dua indikator bidang pekerjaan umum yang harus dilaksanakan beserta jenis pelayanan dasar dan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) seperti tertera dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.33 Target Capaian untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

4.3.3 Realisasi

Capaian untuk layanan dasar air minum maupun air limbah dijabarkan pada table dibawah, dimana dapat diketahui jumlah rumah tangga yang belum terlayani air minum maupun air limbah, untuk kemudian direkapitulasi dalam bentuk persentase layanan.

Tabel 4.34 Capaian Layanan Air Minum

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
1	TANJUNG	JANGKUNG	1580	1100	7	473
2		TANJUNG	1835	1730	300	-195
3		AGUNG	937	956	98	-117
4		HIKUN	1258	691	140	427
5		BANYU TAJUN	561	271	36	254
6		PAMARANGAN KIWA	678	497	38	143
7		PUAIN KIWA	368	288	2	78
8		JUAI	449	316	318	-185
9		MAHE SEBERANG	222	50	35	137
10		KAMBITIN	815	103	392	320
11		WAYAU	1258	620	674	-36
12		GARUNGGUNG	530	390	411	-271
13		KITANG	495	91	351	53
14		SUNGAI PIMPING	629	252	182	195
15		KAMBITIN RAYA	914	336	615	-37
16	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	3697	3285	494	-82
17		BELIMBING	1705	659	352	694
18		SULINGAN	1371	765	117	489
19		MABUUN	4147	4783	373	-1009
20		PEMBATAAN	3258	5770	577	-3089
21		MABURAI	1467	730	545	192
22		KASIAU	879	214	555	110
23		KAPAR	1606	366	33	1207

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
24		MASUKAU	589	116	0	473
25		KASIAU RAYA	274	61	35	178
26	TANTA	MURUNG BARU	303	103	177	23
27		LUK BAYUR	425	203	15	207
28		WALANGKIR	386	60	180	146
29		WARUKIN	833	197	587	49
30		BARIMBUN	540	224	340	-24
31		MANGKUSIP	634	461	23	150
32		PAMARANGAN KANAN	352	90	20	242
33		PULAU KU,U	449	217	189	43
34		TANTA	629	209	30	390
35		PADANG PANJANG	772	42	530	200
36		PUAIN KANAN	358	524	5	-171
37		PADANGIN	403	287	58	58
38		TAMIYANG	247	0	215	32
39		TANTA HULU	1489	113	410	966
40	KELUA	PULAU	832	509	41	282
41		AMPUKUNG	804	140	26	638
42		TELAGA ITAR	518	132	21	365
43		SUNGAI BULUH	633	142	24	467
44		BINTURU	771	57	362	352
45		PUDAK SETEGAL	772	552	36	184
46		PASAR PANAS	470	58	250	162
47		MASINTAN	814	216	26	572
48		TAKULAT	611	532	64	15
49		PALIAT	652	117	11	524
50		KARANGAN PUTIH	908	284	401	223
51		BAHUNGIN	731	167	154	410
52	MUARA HARUS	MADANG	250	0	80	170
53		TANTARINGIN	455	193	280	-18
54		MURUNG KARANGAN	544	236	200	108
55		PADANGIN	280	0	143	137
56		MANDUIN	274	196	120	-42
57		MANTUIL	326	41	87	198
58		HARUS	239	96	0	143
59	BANUA LAWAS	HAPALAH	369	100	0	269
60		BANGKILING	516	209	19	288
61		SUNGAI DURIAN	350	240	66	44
62		PEMATANG	531	174	308	49
63		HARIANG	677	258	353	66
64		BANUA LAWAS	592	229	126	237
65		HABAU	593	279	222	92
66		BENUA RANTAU	597	315	95	187
67		PURAI	574	103	174	297
68		BATANG BANYU	198	98	85	15
69		HABAU HULU	451	156	182	113
70		BUNGIN	285	206	52	27
71		BANGKILING RAYA	332	0	5	327
72		TALAN	329	26	219	84
73		SUNGAI ANYAR	524	155	29	340
74	PUGAAN	PUGAAN	464	91	189	184
75		PAMPANAN	504	88	213	203
76		SEI RUKAM II	223	37	102	84
77		SEI RUKAM I	318	262	47	9
78		JIRAK	403	148	247	8
79		HALANGAN	329	208	60	61
80		TAMUNTI	318	81	171	66
81	MUARA UYA	KUPANG NUNDIRING	424	72	334	18
82		MANGKUPUM	811	186	556	69
83		PASAR BATU	445	155	229	61
84		UWIE	821	328	490	3
85		MUARA UYA	1127	455	434	238
86		LUMBANG	1164	169	847	148
87		SANTUUN	511	273	218	20
88		SIMPUNG LAYUNG	724	376	466	-118
89		BINJAI	362	134	104	124
90		PALAPI	533	240	430	-137
91		KAMPUNG BARU	423	171	350	-98
92		SALIKUNG	319	186	30	103
93		RIBANG	610	318	319	-27
94		SUNGAI KUMAP	97	86	0	11
95	HARUAI	MARINDI	935	668	769	-502
96		WIRANG	774	48	93	633
97		BONGKANG	834	258	193	383
98		NAWIN	764	501	400	-137
99		HALONG	613	415	203	-5

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI		
			TOTAL	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	3	4	5	6	7
100		HAYUP	948	155	593	200
101		KEMBANGKUNING	650	0	231	419
102		SERADANG	591	6	138	447
103		MAHE PASAR	478	274	445	-241
104		LOK BATU	404	1	323	80
105		SUPUT	684	317	268	99
106		SURIYAN	378	0	339	39
107		CATUR KARYA	254	117	215	-78
108	BINTANG ARA	WALING	360	161	43	156
109		USIH	589	341	194	54
110		BINTANG ARA	644	269	430	-55
111		BURUM	317	189	0	128
112		PANAAN	449	82	83	284
113		DAMBUNG RAYA	256	66	45	145
114		ARGO MULYO	289	269	220	-200
115		BUMI MAKMUR	203	189	0	14
116		HEGAR MANAH	172	156	0	16
117	UPAU	BILAS	509	197	231	81
118		KAONG	372	173	0	199
119		PANGELAK	522	190	170	162
120		KINARUM	291	265	0	26
121		MASINGAI II	509	163	324	22
122		MASINGAI I	543	228	138	177
123	JARO	TERATAU	551	424	478	-351
124		NAMUN	539	113	1350	-924
125		JARO	1173	104	872	197
126		SOLAN	792	22	524	246
127		MUANG	535	0	488	47
128		LANO	328	109	194	25
129		PURUI	219	0	211	8
130		GARAGATA	637	177	434	26
131		NALUI	646	171	502	-27
TOTAL			87826	44268	30697	12861

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.35 Capaian Layanan Air Limbah Domestik

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI							
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	TANJUNG	JANGKUNG	1580	1561	19	0	0	0	1380	19	0
2		TANJUNG	1835	1810	25	0	30	0	1471	25	0
3		AGUNG	937	926	11	0	0	0	881	11	0
4		HIKUN	1258	1255	3	0	0	0	769	3	0
5		BANYU TAJUN	561	561	0	0	0	0	555	0	0
6		PAMARANGAN KIWA	678	674	4	0	0	0	645	4	0
7		PUAIN KIWA	368	342	1	25	0	0	337	1	25
8		JUAI	449	424	0	25	0	0	451	0	25
9		MAHE SEBERANG	222	220	2	0	0	0	302	2	0
10		KAMBITIN	815	813	2	0	0	0	532	2	0
11		WAYAU	1258	1249	9	0	0	0	674	9	0
12		GARUNGGUNG	530	529	1	0	0	0	430	1	0
13		KITANG	495	494	1	0	0	0	572	1	0
14		SUNGAI PIMPING	629	629	0	0	0	0	633	0	0
15		KAMBITIN RAYA	914	914	0	0	0	0	664	0	0
16	MURUNG PUDAK	BELIMBING RAYA	3697	3586	111	0	0	0	4073	111	0
17		BELIMBING	1705	1611	44	50	0	0	1601	44	50
18		SULINGAN	1371	1200	5	166	0	96	972	5	166
19		MABUUN	4147	3919	178	50	0	226	2433	178	50
20		PEMBATAAN	3258	3074	82	102	0	188	2629	82	102
21		MABURAI	1467	1402	65	0	0	68	811	65	0
22		KASIAU	879	837	2	40	0	73	787	2	40
23		KAPAR	1606	1601	5	0	0	0	1362	5	0
24		MASUKAU	589	589	0	0	0	0	575	0	0
25		KASIAU RAYA	274	274	0	0	0	0	248	0	0
26	TANTA	MURUNG BARU	303	303	0	0	0	0	548	0	0
27		LUK BAYUR	425	417	8	0	0	0	692	8	0
28		WALANGKIR	386	386	0	0	0	0	227	0	0
29		WARUKIN	833	805	3	25	0	0	888	3	25
30		BARIMBUN	540	540	0	0	0	0	571	0	0
31		MANGKUSIP	634	634	0	0	0	0	846	0	0
32		PAMARANGAN KANAN	352	350	2	0	0	0	634	2	0
33		PULAU KU,U	449	449	0	0	0	0	466	0	0
34		TANTA	629	604	25	0	0	0	715	25	0
35		PADANG	772	771	1	0	0	0	814	1	0

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI							
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PANJANG									
36		PUAIN KANAN	358	323	10	25	0	0	596	10	25
37		PADANGIN	403	403	0	0	0	0	1335	0	0
38		TAMIYANG	247	246	1	0	0	0	337	1	0
39		TANTA HULU	1489	1442	47	0	0	0	1568	47	0
40	KELUA	PULAU	832	832	0	0	0	0	958	0	0
41		AMPUKUNG	804	804	0	0	0	0	834	0	0
42		TELAGA ITAR	518	517	1	0	0	0	598	1	0
43		SUNGAI BULUH	633	633	0	0	0	0	741	0	0
44		BINTURU	771	731	0	40	0	0	472	0	40
45		PUDAK SETEGAL	772	772	0	0	0	0	881	0	0
46		PASAR PANAS	470	470	0	0	0	0	497	0	0
47		MASINTAN	814	814	0	0	0	0	816	0	0
48		TAKULAT	611	608	3	0	0	0	693	3	0
49		PALAT	652	650	2	0	0	0	627	2	0
50		KARANGAN PUTIH	908	907	1	0	0	0	821	1	0
51		BAHUNGIN	731	731	0	0	0	0	698	0	0
52	MUARA HARUS	MADANG	250	250	0	0	0	0	223	0	0
53		TANTARINGIN	455	455	0	0	0	0	398	0	0
54		MURUNG KARANGAN	544	543	1	0	0	0	571	1	0
55		PADANGIN	280	280	0	0	0	0	284	0	0
56		MANDUIN	274	273	1	0	0	0	252	1	0
57		MANTUIL	326	324	2	0	0	0	225	2	0
58		HARUS	239	239	0	0	0	0	250	0	0
59	BANUA LAWAS	HAPALAH	369	369	0	0	0	368	0	0	0
60		BANGKILING	516	516	0	0	0	414	80	0	0
61		SUNGAI DURIAN	350	350	0	0	0	303	27	0	0
62		PEMATANG	531	531	0	0	0	501	4	0	0
63		HARIANG	677	677	0	0	0	614	3	0	0
64		BANUA LAWAS	592	592	0	0	0	531	26	0	0
65		HABAU	593	593	0	0	0	698	58	0	0
66		BENUA RANTAU	597	597	0	0	0	533	27	0	0
67		PURAI	574	573	1	0	0	462	61	1	0
68		BATANG BANYU	198	198	0	0	0	113	81	0	0
69		HABAU HULU	451	451	0	0	0	431	0	0	0
70		BUNGIN	285	285	0	0	0	255	2	0	0
71		BANGKILING RAYA	332	332	0	0	0	231	80	0	0
72		TALAN	329	329	0	0	0	275	0	0	0
73		SUNGAI ANYAR	524	524	0	0	0	523	6	0	0
74	PUGAAN	PUGAAN	464	462	2	0	0	0	404	2	0
75		PAMPANAN	504	504	0	0	0	0	74	0	0
76		SEI RUKAM II	223	223	0	0	0	0	251	0	0
77		SEI RUKAM I	318	318	0	0	0	0	300	0	0
78		JIRAK	403	403	0	0	0	0	305	0	0
79		HALANGAN	329	329	0	0	0	0	323	0	0
80		TAMUNTI	318	318	0	0	0	0	304	0	0
81	MUARA UYA	KUPANG NUNDIRING	424	424	0	0	0	0	423	0	0
82		MANGKUPUM	811	811	0	0	0	0	51	0	0
83		PASAR BATU	445	445	0	0	0	0	369	0	0
84		UWIE	821	821	0	0	0	0	735	0	0
85		MUARA UYA	1127	1124	3	0	0	0	904	3	0
86		LUMBANG	1164	1164	0	0	0	0	1035	0	0
87		SANTUUN	511	510	1	0	0	0	469	1	0
88		SIMPUNG LAYUNG	724	724	0	0	0	0	0	0	0
89		BINJAI	362	362	0	0	0	0	360	0	0
90		PALAPI	533	533	0	0	0	0	485	0	0
91		KAMPUNG BARU	423	422	1	0	0	0	343	1	0
92		SALIKUNG	319	319	0	0	0	0	295	0	0
93		RIBANG	610	610	0	0	0	0	521	0	0
94		SUNGAI KUMAP	97	97	0	0	0	0	85	0	0
95	HARUAI	MARINDI	935	935	0	0	0	0	888	0	0
96		WIRANG	774	771	3	0	0	0	968	3	0
97		BONGKANG	834	833	1	0	0	0	863	1	0
98		NAWIN	764	764	0	0	0	0	826	0	0
99		HALONG	613	613	0	0	0	0	768	0	0
100		HAYUP	948	947	1	0	0	0	827	1	0
101		KEMBANGKUNING	650	650	0	0	0	0	472	0	0
102		SERADANG	591	590	1	0	0	0	451	1	0
103		MAHE PASAR	478	477	1	0	0	0	637	1	0
104		LOK BATU	404	404	0	0	0	0	388	0	0
105		SUPUT	684	684	0	0	0	0	587	0	0
106		SURIYAN	378	328	0	50	0	0	529	0	50
107		CATUR KARYA	254	254	0	0	0	0	364	0	0
108	BINTANG ARA	WALING	360	360	0	0	0	0	357	0	0
109		USIH	589	589	0	0	0	0	434	0	0
110		BINTANG ARA	644	644	0	0	0	0	502	0	0
111		BURUM	317	317	0	0	0	0	246	0	0
112		PANAAN	449	449	0	0	0	0	371	0	0
113		DAMBUNG RAYA	256	256	0	0	0	0	206	0	0
114		ARGO MULYO	289	289	0	0	0	0	259	0	0
115		BUMI MAKMUR	203	203	0	0	0	0	199	0	0

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	TARGET	REALISASI							
			TOTAL	AKSES DASAR / AKSES LAYAK PERDESAAN	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T	TANPA AKSES	AKSES DASAR	AKSES LAYAK	AKSES AMAN SPALD-S	AKSES AMAN SPALD-T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116		HEGAR MANAH	172	172	0	0	0	0	154	0	0
117	UPAU	BILAS	509	506	3	0	0	0	466	3	0
118		KAONG	372	372	0	0	0	0	225	0	0
119		PANGELAK	522	522	0	0	0	0	447	0	0
120		KINARUM	291	291	0	0	0	0	290	0	0
121		MASINGAI II	509	509	0	0	0	0	527	0	0
122		MASINGAI I	543	541	2	0	0	0	571	2	0
123	JARO	TERATAU	551	551	0	0	0	0	600	0	0
124		NAMUN	539	539	0	0	0	0	1216	0	0
125		JARO	1173	1173	0	0	0	0	1335	0	0
126		SOLAN	792	792	0	0	0	0	782	0	0
127		MUANG	535	535	0	0	0	0	544	0	0
128		LANO	328	278	0	50	0	0	331	0	50
129		PURUI	219	219	0	0	0	0	214	0	0
130		GARAGATA	637	637	0	0	0	0	646	0	0
131		NALUI	646	646	0	0	0	0	640	0	0
TOTAL			87826	86480	698	648	30	6778	75359	698	648

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.36 Rekapitulasi Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah Domestik

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah di Kabupaten/Kota	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	87826	74965	12861	85,36
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	87826	83483	4343	95,05

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

Analisis Hasil Capaian:

1. Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – hari

Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Target SPM untuk pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari yaitu 100%, dimana direalisasikan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota baik menggunakan dana APBD maupun dana DAK Fisik Bidang Air Minum.

Target SPM 2024 adalah 100%, yang berarti melayani seluruh rumah tangga di Kabupaten-Kota, dimana jumlah rumah tangga menurut data Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yaitu sebanyak 87826 KK.

Sedangkan Hasil Capaian air minum sampai dengan 2024 yaitu : 74965 SR, yang berarti melayani 74965 KK.

Sehingga Hasil Capaian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\% \text{ Hasil Capaian} = \frac{\Sigma \text{ Rumah tangga terlayani}}{\Sigma \text{ Rumah tangga di Kabupaten Tabalong}} \times 100 \%$$

$$\% \text{ Hasil Capaian} = \frac{74965 \text{ KK}}{87826 \text{ KK}} \times 100 \%$$

$$= 85,36\%$$

Artinya :

Secara kumulatif pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sampai dengan Tahun 2024 adalah 85,36% dimana melayani 74965 KK dari jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 87826 KK, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga persentase capaian belum mencapai 100%. Namun untuk tahun 2024 sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki target tahunan 1500 SR terpasang dan telah terealisasi sebanyak 2434 SR yang berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tabalong telah melebihi target tahun 2024 tersebut. Untuk tahun-tahun ke depan kinerja pelayanan kebutuhan pokok air minum akan terus ditingkatkan agar target 100% akses air minum tercapai.

2. Pelayanan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik

Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik

Target SPM untuk pelayanan Penyediaan Pengolahan Air Limbah Domestik yaitu 100%, dimana direalisasikan melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota baik menggunakan dana APBD maupun DAK bidang sanitasi.

Target SPM 2024 adalah 100%, yang berarti melayani seluruh rumah tangga di Kabupaten-Kota, dimana jumlah rumah tangga data Disdukcapil Kabupaten Tabalong Tahun 2024 yaitu sebanyak 87826 KK.

Sedangkan Hasil Capaian pengolahan air limbah domestik sampai dengan 2024 yaitu : 83483 SR, yang berarti melayani 83483 KK.

Sehingga Hasil Capaian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% \text{ Hasil Capaian pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten Tabalong adalah} \\ &= \frac{\Sigma \text{ rumah yang sudah terlayani akses air limbah (terlayani akses dasar atau akses layak perdesaan + terlayani akses aman SPALD - S + terlayani akses aman SPALD - T)}}{\Sigma \text{ rumah di Kabupaten Tabalong}} \times 100 \% \\ \% \text{ Hasil Capaian} &= \frac{82137 + 698 + 648}{87826} \times 100 \% \\ &= \frac{83483}{87826} \times 100 \% \\ &= 95,05 \% \end{aligned}$$

Artinya :

Secara kumulatif pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik sampai dengan Tahun 2024 adalah 95,05% dimana melayani 83483 KK dari jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 87826 KK, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga persentase capaian belum mencapai 100%. Namun untuk tahun 2024 sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan

Sub Sistem Pengolahan Setempat memiliki target tahunan 1 unit tangki septik terpasang dimana mampu melayani 1 KK secara individual dan telah terealisasi sebanyak 682 unit tangki septik individual dimana melayani 682 KK, yang berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab.Tabalong telah melebihi target tahun 2024 tersebut. Untuk tahun-tahun ke depan kinerja pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik akan terus ditingkatkan agar target 100% akses sanitasi tercapai.

Adapun capaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong berdasarkan Permen PU Nomor 29 Tahun 2018 tentang standar teknis SPM PUPR yaitu :

1. Data penerima pelayanan dasar :

- a. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S sebanyak 82137 SR / melayani 82137 KK.
- b. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T adalah 648 SR / melayani 648 KK.
- c. Data jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-S dan SPALD-T yaitu sebanyak 83483 SR.
- d. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja adalah sebanyak 698 SR / melayani 698 KK.
- e. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja adalah sebanyak 698 SR / melayani 698 KK.
- f. Data jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik adalah sebanyak 698 SR / melayani 698 KK, dimana 698 SR atau rumah yang lumpur tinjanya diolah di IPLT dan ditambah dengan 648 SR merupakan rumah yang menggunakan SPALD-T melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong.

2. Data Kinerja Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

a. Untuk Kinerja pelayanan SPALD-S akses dasar

$$= \frac{\sum \text{rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik}}{\sum \text{rumah di Wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha}} \times 100 \%$$

$$= \frac{73776}{79036} \times 100 \% = 93,34\%$$

Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik sebanyak 73776 rumah dari 79036 rumah tangga di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/Ha, sehingga kinerja pelayanan SPALD-S akses dasar yaitu 93,34%. Kepadatan penduduk < 25 jiwa/ha ini ada disemua desa/kelurahan kecuali Kelurahan Tanjung, Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Pembataan yang memiliki kepadatan penduduk melebihi 25 jiwa/Ha

b. Untuk Kinerja pelayanan SPALD-S akses aman

$$= \frac{\Sigma \text{ rumah yg lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\Sigma \text{ rumah di Wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha}} \times 100 \%$$

$$= \frac{698}{8790} \times 100 \% = 7,94 \%$$

Data jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT adalah 698 SR, serta jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha sebanyak 8790 KK yaitu di Kelurahan Tanjung, Kelurahan Belimbing Raya dan Kelurahan Pembataan, sehingga kinerja pelayanan SPALD-S akses aman yaitu 7,94%.

c. Untuk Kinerja pelayanan SPALD-T akses aman

$$= \frac{\Sigma \text{ rumah yg memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\Sigma \text{ rumah di Wilayah pengembangan SPALD - T (jumlah seluruh rumah di Kabupaten/Kota)}} \times 100 \%$$

$$= \frac{648}{20620} \times 100 \% = 3,14 \%$$

Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD sebanyak 648 rumah dengan jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T sebanyak 20620 rumah sehingga kinerja pelayanan SPALD-T akses aman sebesar 3,14%.

4.3.4 Alokasi Anggaran

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki alokasi anggaran guna melaksanakan dan mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tabalong, antara lain sebagai berikut :

Tabel 4.37 Alokasi Anggaran untuk SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	39.718.747.273 199.999.590
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota 1. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah	7.420.670.606

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
			Domestik (SPALD) Setempat 2. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	155.480.000
TOTAL				47.494.897.469

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

4.3.5 Dukungan Personil

Dalam melakukan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), semua Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ikut mendukung, terutama dalam hal ini khususnya adalah ASN yang ada pada bidang Cipta Karya. Bidang Cipta Karya terdiri dari 10 (sebelas) orang yang terbagi :

1. Kepala Bidang Cipta Karya (1 orang)
2. Jabatan Fungsional (2 orang)
3. Staf PNS Bidang Cipta Karya (5 orang)
4. Tenaga Kerja Lepas (TKL) non PNS (2 orang)

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Permasalahan Air Bersih:

Jaringan perpipaan air bersih belum mencakup seluruh wilayah.

b. Permasalahan Sanitasi:

- Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai sistem jaringan perpipaan air limbah (SPALD), yang sering dianggap kotor atau menjijikkan.
- Ketersediaan lahan untuk pembangunan SPALD terbatas karena berada di kawasan pemukiman masyarakat.

2. Solusi

a. Solusi Permasalahan Air Bersih:

Diperlukan penganggaran atau pendanaan untuk memperluas jaringan perpipaan air bersih hingga ke desa-desa.

b. Solusi Permasalahan Sanitasi:

- Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan air limbah (SPAL).
- Menyediakan anggaran atau pendanaan untuk pengadaan lahan SPAL.

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

Tabel 4.38 Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator
1	2	3
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Tabel 4.39 Batas Waktu Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan	Nilai Capaian Tahun 2024	Tahun
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

4.4.3 Realisasi

Tabel 4.40 Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	2	3	4
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	16 Unit	16 Unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	40 Unit	38 Unit

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

Adapun capaian SPM Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang telah direalisasikan pada tahun 2024 sebanyak 16 (enam belas) unit rumah, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 ada sebanyak 16 (enam belas) unit rumah, oleh karena itu kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni berbagi korban bencana berjalan dengan sesuai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit. Dimana pada kegiatan RTLH terbangun dengan target 40 (empat puluh satu) unit pada Tahun 2024. Kegiatan RTLH terbangun dan tertangani sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 95%. Oleh karena itu total fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan 38 (tiga puluh delapan) unit.

4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4.41 Alokasi Anggaran Kegiatan Terkait SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Pengembangan Perumahan	2.515.098.000
2	Program Kawasan Permukiman	19.992.725.540
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	8.541.796.000

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM :

1. PNS;
2. Non-PNS

Tabel 4.42 Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Kepangkatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	2	3	4
1	Pembina Tk.I	(IV/b)	2 Orang
2	Pembina	(IV/a)	2 Orang
3	Penata Tk. I	(III/d)	3 Orang
TOTAL			7 Orang

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

Tabel 4.43 Jumlah Pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Berdasarkan Pendidikan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Pendidikan	Jumlah
1	2	3
1	Strata 2 (S2)	3 Orang
2	Strata 1 (S1)	4 Orang
TOTAL		7 Orang

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan implementasi SPM meliputi belum lengkapnya regulasi, pemahaman yang beragam, serta kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan. Indikator SPM belum sepenuhnya diintegrasikan dalam perencanaan, sementara kualitas perencanaan dan pemrograman masih perlu ditingkatkan. Selain itu, belum tersedia pedoman operasional yang jelas, basis data akurat, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang optimal.

Solusi untuk mengatasi kendala implementasi SPM, perlu percepatan penerbitan SPM di semua urusan, peningkatan pemahaman melalui sosialisasi, serta internalisasi indikator SPM dalam perencanaan daerah. Sinergi antar pemangku kepentingan harus diperkuat, didukung dengan pedoman operasional yang jelas dan basis data akurat. Selain itu, perencanaan berbasis kebutuhan serta monitoring dan evaluasi yang sistematis perlu ditingkatkan guna memastikan pencapaian SPM secara optimal.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 - a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar terdiri dari :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas. Khusus untuk penanganan Epidemi/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas diantaranya: rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza.

Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.44 Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) 2024 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM 2024
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2024

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel 4.45 Target Pelayanan Informasi Rawan Bencana

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator SPM	Target	Cara Menghitung
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Tersedianya data/ informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	100%	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen KRB lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja : $\frac{x}{y} \times 100\%$
2	Komunikas, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	Rumus: X = Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Y = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana Indikator Kinerja : $\frac{x}{y} \times 100\%$

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel 4.46 Target Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator SPM	Target	Cara Menghitung
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen RPB

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator SPM	Target	Cara Menghitung
1	2	3	4	5	6
					lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y} \times 100\%$
2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal	100%	Rumus: X = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun Y = Jumlah satu dokumen Renkon lengkap dan sudah disahkan Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y} \times 100\%$
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	Rumus: X = Jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah apatur dan Warga Negara di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$
4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan	100%	Rumus : X = Jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan Y = Jumlah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y} \times 100\%$
5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana	100%	Rumus : X = Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops Y = Jumlah

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator SPM	Target	Cara Menghitung
1	2	3	4	5	6
		bencana	prasarana penanggulangan bencana		Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y} \times 100\%$
6	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	Rumus : X = Jumlah Warga Negara mendapat peralatan perlindungan Y = Jumlah Warga Negara di Kawasan rawan bencana Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y} \times 100\%$

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 4.47 Target Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator SPM	Target	Cara Menghitung
1	2	3	4	5	6
1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)	100%	Rumus : X = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Y = Jumlah seluruh penetapan status KLB Indikator Kinerja : $\frac{X}{Y} \times 100\%$
2	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil	Persentase kecepatan respon kurang	100%	Rumus : X = Jumlah

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator SPM	Target	Cara Menghitung
1	2	3	4	5	6
		penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%)		kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Y = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana Indikator Kinerja : $\frac{x}{y} \times 100\%$
3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Rumus : X = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana Y = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana Indikator Kinerja : $\frac{x}{y} \times 100\%$
4	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana	100%	Rumus : X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana Indikator Kinerja: $\frac{x}{y} \times 100\%$

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

4.5.3 Realisasi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.48 Capaian SPM 2024 – Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target SPM 2024	Realisasi SPM 2024
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2024

Adapun Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum

Berdasarkan kegiatan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hokum terhadap pelanggaran perda dan perkada.

b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis tentang kegiatan pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran.

Dalam penyelamatan dan pelayanan evakuasi korban kebakaran paling sedikit memuat:

- 1) Layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;
- 2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- 3) Layanan pelaksanaan dan penyelamatan evakuasi;
- 4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran;
- 5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

Tingkat waktu tanggap (response time) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran atau operasi penyelamatan (non

kebakaran). Adapun waktu tanggap (response time) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi / laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Teknis penghitungan pencapaian SPM sub urusan kebakaran dilihat dari dua indikator, yaitu indikator utama layanan SPM dan indikator penunjang layanan capaian SPM.

a. Indikator Utama Layanan SPM Sub Urusan Kebakaran

- 1) Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Rumus:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten Tabalong pada tahun 2024 dalam tingkat waktu tanggap (*Respon Time*) oleh Bidang Pemadam Kebakaran x100%

$$\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2024} \\ = \frac{54}{54} \times 100\% = 100\%$$

b. Indikator Penunjang Layanan Capaian SPM

- 1) Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Rumus:

Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Bidang Pemadam kebakaran dan penyelamatan di Kabupaten/Kota tahun 2024.

Selama Tahun 2024 terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 102 (Seratus Dua) kali, terdiri dari evakuasi Ular 77 (Tujuh Puluh Tujuh) kali, Evakuasi Tawon 9 (Sembilan) kali, Evakuasi Cincin 3 (Tiga) kali, Evakuasi Kucing 6 (Enam) kali, dan lainnya 7 (Tujuh) kali.

Jadi, Pencapaian SPM Sub urusan kebakaran adalah sebagai berikut :

- a) Capaian SPM Layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran di kabupaten tabalong adalah 100% (seratus) persen;
- b) Layanan penunjang berupa penyelamatan dan evakuasi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) sejumlah 102 kali, terdiri dari :
 - Penanganan evakuasi Ular disekitar pemungkiman warga 77 (Tujuh Puluh Tujuh) kali
 - Penanganan evakuasi Tawon 9 (Sembilan) kali
 - Penanganan evakuasi Cincin 3 (Tiga) kali
 - Penanganan evakuasi Kucing 6 (Enam) kali
 - Dan lainnya 7 (Tujuh) kali

Dari data tersebut diketahui bahwa target pencapaian SPM Sub urusan kebakaran sudah mencapai 100%

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Tabel 4.49 Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi Pencapaian	
			Jumlah Capaian	%
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	1	100%
2	Komunikas, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	1.800	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu.

- 1) Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) pada tahun 2024 disusun atau pencapaian 100%.
- 2) Capaian kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana pada tahun 2024 sebesar 1.800 jiwa atau 100%. Kegiatan ini dilakukan dengan tatap muka langsung dan dilakukan melalui media televisi yakni TV Tabalong, Media Cetak dan Media Sosial BPBD Tabalong.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel 4.50 Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi Pencapaian	
			Jumlah Capaian	%
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	1	100%
2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	1	100%
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan	41	100%

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi Pencapaian	
			Jumlah Capaian	%
1	2	3	4	5
		rawan bencana		
4	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0%
5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	265.820	100%
6	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	1.800	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu

- 1) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) pada tahun 2024 disusun atau pencapaian 100%.
- 2) Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon) pada tahun 2024 disusun atau pencapaian 100%.
- 3) Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi pada tahun 2024 ada atau pencapaian 100%. Hal ini sudah dianggarkan dalam DPA APBD tahun 2024 sehingga Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Aparatur dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Warga Negara atau masyarakat bisa dilaksanakan.
- 4) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2024 dengan pencapaian 100%. Gladi dilakukan dengan kegiatan apel siaga bencana untuk bencana karhutla dan bencana banjir.
- 5) Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana pada tahun 2024 dengan jumlah warga Negara yang mendapat layanan Pusdalops sebanyak 265.820 jiwa, atau sebesar 100% dari jumlah penduduk sebanyak 265.820 jiwa.
- 6) Penyediaan peralatan perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai 1.800 orang atau capaian sebesar 100%.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Tabel 4.51 Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi Pencapaian	
			Jumlah Capaian	%
1	2	3	4	5
1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	0	0%
2	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	150	100%
3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	24	100%
4	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	11	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

- 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/ wabah zoonosis prioritas pada tahun 2024 dengan capaian 0%. Tidak Adanya Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Tabalong.
- 2) Respon Cepat Darurat Bencana pada tahun 2024 ada beberapa kejadian.
- 3) Aktivitas Komando Penanganan Darurat Bencana mencapai 24 orang atau capaian 100%. Sebanyak 41 orang petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong dan 2.356 orang anggota UPBS sekabupaten Tabalong Aktif dalam penanganan darurat bencana.
- 4) Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Bencana, dimana jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi sebanyak 11 orang atau dengan capaian 100%.

4.5.4 Alokasi Anggaran

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.52 Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024

No	Jenis Dasar	Indikator	APBD 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	0
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	889.768.320

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2024

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah anggaran yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong sebesar Rp. 12.086.388.321,- dan realisasi belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 10.530.359.589,- atau sebesar 87,13% bersumber Dana APBD Kabupaten Tabalong dengan perincian

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 8.083.825.632,- terdiri
 - Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.372.459.277,-
 - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 5.711.366.355,-
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 2.446.533.957,-

Alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.53 Anggaran dan Realisasi Program Penanggulangan Bencana Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana	Penerapan SPM
1	2	3	4	5	6
1	Program Penanggulangan Bencana				
	a. Pelayanan Pencegahan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	5.521.328.286	4.714269.170	APBD	Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Sub Kegiatan : - Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Penyediaan peralatan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sumber Dana	Penerapan SPM
1	2	3	4	5	6
					perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Apel Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
	b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	154.757.030	139.032.930	APBD	Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi rawan bencana Penyusunan Dokumen Kajian Resiko Bencana
	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Rumus : X = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi Y = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana Indikator Kinerja: $\frac{X}{Y} \times 100\%$

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

4.5.5 Dukungan Personil

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.54 Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Jenis Dasar	Indikator	Dukungan Personil		
			PNS	PPPK	NON PNS
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	Personil Satpol PP 13 orang PNS	-	Personil Satpol PP 45 orang

No	Jenis Dasar	Indikator	Dukungan Personil		
			PNS	PPPK	NON PNS
1	2	3	4	5	6
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Terdiri dari Petugas Damkar 5 PNS	Terdiri dari Petugas Damkar 1 Orang	Terdiri dari Petugas Damkar 25 Orang Non PNS

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2024

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.55 Dukungan Personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024

URAIAN	ASN	Pegawai Kontrak
1	2	3
Status Kependidikan	13 orang	29 orang
Tingkat Pendidikan		
a. Strata 2	3 orang	0 orang
b. Strata 1	4 orang	12 orang
c. Diploma III	1 orang	1 orang
d. SLTA Sederajat	5 orang	16 orang
e. SLTP Sederajat	0 orang	0 orang
Jenis Kelamin		
a. Laki-laki	10 orang	20 orang
b. Perempuan	3 orang	8 orang
Golongan Kependidikan		
a. Gol I	0 orang	-
b. Gol II	5 orang	-
c. Gol III	5 orang	-
d. Gol IV	3 orang	-
Berdasarkan Eselon		
a. Eselon II	-	-
b. Eselon III	1 orang	-
c. Eselon IV	4 orang	-

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong, 2024

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tabel 4.56 Permasalahan dan Solusi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Jenis Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	Masih adanya Peraturan Daerah yang masih kurang dipahami/dilanggar	Lebih sering memberikan sosialisasi terhadap perda tersebut
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	nya jumlah sarana dan kualitas sarana operasional damkar dan terkendalanya	Perlunya penambahan unit sarana damkar dan penambahan wilayah

No	Jenis Dasar	Indikator	Hambatan	Solusi
1	2	3	4	5
			<p>pelayanan kejadian kebakaran untuk jarak yang jauh sehingga banyak yang tidak dapat tertangani sesuai dengan waktu tanggap respon</p> <p>Terbatasnya jumlah personel damkar dan kurangnya kualitas standar personel damkar</p>	<p>manajemen kebakaran untuk pelayanan bencana serta perlunya penambahan personel dan dilakukannya pelatihan/diklat untuk standar kualitas personel tentang penanggulangan bencana kebakaran</p>

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong, 2024

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

- 1) Tipelogi B sehingga minim jabatan
- 2) Personel ASN yang minim hanya 13 orang
- 3) SPM belum dipahami oleh pegawai

b. Solusi

- 1) Pengajuan peningkatan tipelogi menjadi Tipe A
- 2) Pengajuan penambahan personel baik mutasi maupun formasi baru
- 3) Sosialisasi tentang SPM kepada pegawai

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, yang telah ditetapkan SPM nya oleh Pemerintah Pusat adalah :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target dan Pencapaian SPM Bidang Sosial untuk pemenuhan pelayanan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 4.57 Pemenuhan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Tabalong

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Program Rehabilitasi Sosial				
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti.	95 orang	95 orang	100 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar diluar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti.	694 orang	694 orang	100 %
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis diluar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti.	22 orang	22 orang	100 %
2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	Kegiatan Penjangkauan Anak anak terlantar dalam dan luar panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar dalam dan luar panti.	607 anak	607 anak	100 %
3	Program Penanganan Bencana				
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/kota.	Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 476 Keluarga. - penerima bantuan permakanan dan sandang korban bencana sebanyak 48 keluarga. - penyediaan permakanan untuk korban banjir sebanyak 838 Keluarga di daerah Banyu Tajun dan Binturu.	Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 476 Keluarga. - penerima bantuan permakanan dan sandang korban bencana sebanyak 48 keluarga. - penyediaan permakanan untuk korban banjir sebanyak 838 Keluarga di daerah Banyu Tajun dan Binturu.	100 %
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2024

4.6.3 Realisasi

Analisa capaian realisasi SPM bidang Sosial pada tahun 2024 dapat diuraikan dengan lebih ringkas sebagai berikut :

1. Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki.

Dinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki 1 Layanan Data satu pintu yang bernama BAHTERA SOSIAL (Bantuan Kesejahteraan Sosial),

yang mana didalamnya berisi 3 Layanan, yaitu :

- Data Kemiskinan. Data ini berfungsi sebagai data dasar pelaksanaan penerapan SPM.
 - Layanan Pengaduan Online melalui <https://bahtera.tabalongkab.go.id>
 - Layanan Pengaduan Offline melalui :
 - 1) Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kab. Tabalong.
 - 2) Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kab. Tabalong atau di Mall Pelayanan Publik Kab. Tabalong.
2. Dalam rangka Kesiapsiagaan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah menyiapkan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial lainnya antara lain sebagai berikut :
- a. TAGANA, Sahabat TAGANA DAN Tim Reaksi Cepat.
Jumlah Personil untuk TAGANA (Taruna Siaga Bencana) sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
 - b. Kampung Siaga Bencana.
Kampung Siaga Bencana yang sudah terbentuk ada pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai dan Kecamatan Banua Lawas.
 - c. Kendaraan Siaga Bencana.
Kendaraan Siaga Bencana yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana sebanyak 5 (lima) unit yaitu 1 (satu) unit RTU, 4 (empat) unit Sepeda trail, 1 (satu) unit Truck Barang, 1 (satu) unit Truck Dapur Umum dan 1 (satu) unit VIAR.
 - d. Alat Evakuasi.
Alat Evakuasi yang dimiliki untuk Operasional Penanganan Bencana ada 4 (empat) unit perahu yaitu 1 (satu) unit Perahu Karet, 1 (satu) unit perahu fiber, 1 (satu) unit perahu floating dan 1 (satu) unit perahu dolphin dan tenda sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
 - e. Sistem Komunikasi.
Sistem Komunikasi yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana ada 10 (sepuluh) unit HT, 1 (satu) unit radio reg.
 - f. Mitra Kerja dengan BPBD dan DAMKAR.
 - g. Gudang.
Gudang yang dimiliki untuk penyimpanan persediaan permakanan dan persediaan sandang dalam rangka ketersediaan buffer stock saat bencana ada 1 (satu) buah.
 - h. Bantuan untuk Santunan Bencana.
Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) keluarga. Penerima bantuan makanan dan sandang korban bencana sebanyak 48 (empat puluh delapan) keluarga. Penyediaan Permakanan untuk korban banjir sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) keluarga didaerah banyu tajun dan binturu.
3. Penerapan SPM untuk pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyandang Disabilitas Terlantar
Penyandang Disabilitas Terlantar di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang. Bantuan tunai tersebut digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan permakanaan, sandang dan perbekalan kesehatan nya.
 - b. Lanjut Usia Terlantar.
Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 250.000,- per orang per bulan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) orang. Bantuan tunai tersebut digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan permakanaan, sandang dan perbekalan kesehatan nya.
 - c. Gelandangan dan Pengemis
Gelandangan dan Pengemis yang ditangani oleh Dinas Sosial mendapatkan layanan bantuan permakanaan, sandang, cek kesehatan dan transportasi untuk kembali ke tempat asalnya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Gelandangan dan Pengemis tersebut sebagian adalah warga Kab. Tabalong dan bukan warga Kab. Tabalong.
4. Rumah Singgah yang tersedia berada di Jl. Tanjung Selatan RT. 07. Kamar yang tersedia sebanyak 12 (dua belas) kamar, Ruang Tamu sebanyak 1 (satu) buah dan Dapur sebanyak 1 (satu) buah. Petugas Kesehatan yang disediakan 1 (satu) orang.
 5. Alat bantu yang tersedia di rumah singgah berupa Kursi Roda sebanyak 1 (satu) buah, Tongkat Walker sebanyak 1 (satu) buah dan Alat Bantu Dengar sebanyak 1 (satu) buah.
 6. Penerima Bantuan yang memanfaatkan alat bantu sebanyak 1 (satu) orang.

4.6.4 Alokasi Anggaran

Tabel 4.58 Anggaran dan Realisasi Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.566.250.000	5.554.050.000
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar	5.566.250.000	5.554.050.000
	Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-anak Terlantar	5.566.250.000	5.554.050.000
2	Program Penanganan Bencana	1.075.866.847	925.490.776
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	640.729.247	539.130.409
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	572.802.695	521.890.409
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	67.926.552	17.240.000
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban	435.137.600	386.360.367

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
	Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota		
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	209.216.650	184.698.201
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	225.920.950	201.662.166
3	Program Rehabilitasi Sosial	3.298.984.269	3.103.404.357
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	3.298.984.269	3.103.404.357
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	546.628.268	481.344.686
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	122.799.001	56.210.000
	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	2.629.557.000	2.565.849.671

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2024

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM khusus bidang sosial dengan status ASN sebanyak 18 (delapan belas) orang PNS, 1 (satu) orang PPPK dan Non ASN sebanyak 234 (dua ratus tiga puluh empat) orang. Personil yang diperlukan terlibat dalam pencapaian SPM ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.59 Data Personil pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong

No	Bidang	Jumlah Personil
1	2	3
1.	Sekretariat	17 orang
	ASN PNS	10 orang
	Non ASN	7 orang
2.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	6 orang
	ASN PNS	4 orang
	Non ASN	3 orang
3.	Bidang Rehabilitasi Sosial	10 orang
	ASN PNS	3 orang
	PPPK	1 orang
	Non ASN	6 orang
4.	Bidang Pemberdayaan Sosial	4 orang
	ASN PNS	1 orang
	Non ASN	3 orang
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial :	205 orang
	TKSK	12 orang
	Fasilitator	131 orang
	SLRT	
	Tagana	30 orang
	Pendamping PKH	32 orang
	TOTAL	242 orang

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2024

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Penerapan SPM pada Dinas Sosial telah terpenuhi untuk melayani subjek sasaran SPM, hanya saja perlu lebih ditingkatkan lagi baik dari segi pemberian pelayanan, pendampingan dan anggaran.

2. Solusi

Perlunya komitmen seluruh personil di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk lebih meningkatkan penerapan SPM sesuai dengan ketentuan.

4.7 Program dan Kegiatan

4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan

Dalam rangka percepatan pencapaian SPM, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan di bidang pendidikan terutama pendidikan dasar. Adapun program kegiatan yang mendukung ketercapaian SPM pada tahun 2024 antara lain yaitu:

Tabel 4.60 Realisasi Program Kegiatan Penunjang SPM Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2024

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi	
				Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	2.222.849.772	100	2.170.104.297	97,63
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	2.015.522.200	100	1.979.931.920	98,23
			Pengadaan Mebel PAUD	198.119.143	100	197.246.000	99,56
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	360.587.860	100	333.023.810	92,36
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	10.363.748.360	100	10.305.839.104,00	99,44
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	324.999.806	100	230.713.600	70,99
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	261.143.329	100	230.382.000	88,22
			Pengelolaan Dana BOP PAUD	5.704.240.000	100	5.694.320.000	99,83
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	432.340.000	100	432.340.000,00	100
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	5.064.534.159	100	4.690.152.523,00	92,61
		Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	126.527.084	100	116.645.000	92,19
			Pengelolaan Dana BOP Sekolah NON Formal/ Kesetaraan	2.021.010.000	100	1.961.414.000	97,05

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi	
				Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	1.018.164.489	100	937.295.052	92,06
2	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	681.120.000	100	613.989.254	90,14
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	371.150.000	100	371.025.000	99,97
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.005.951.500	100	890.725.200	88,55
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	7.915.369.251	100	7.347.241.467	92,82
			Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	340.425.000	100	313.230.000	92,01
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	233.500.000	100	232.697.000	99,66
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	471.947.000	100	470.852.500	99,77
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/ Penjaga Sekolah	240.450.000	100	240.173.100	99,88
			Pengadaan Mebel Sekolah	2.299.776.730	100	2.112.935.000	91,88
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.129.845.467	100	2.087.306.306	98,00
			Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa	943.110.374	100	723.710.819	76,74
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.888.662.318	100	1.236.896.800	65,49
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.127.579.744	100	906.798.366	80,42
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	25.691.830.000	100	25.688.097.044	99,99
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	460.301.440	100	391.749.700	85,11
			Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	1.011.372.000	100	1.011.372.000	100
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	137.785.180	100	118.320.000	85,87
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	7.583.041.166	100	5.091.648.507	67,15
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	534.653.350	100	510.347.830	95,45
			Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	1.099.364.160	100	890.652.179	81,02
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	8.175.085.660	100	7.278.779.589	89,04			
3	Menjamin Peningkatan pengelolaan lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	800.539.728	100	718.689.982	89,78
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	231.999.600	100	231.900.000	99,96
			Pembangunan Laboratorium	2.318.100.000	100	2.318.098.000	99,99
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan	4.427.802.852	100	3.976.594.370	89,91

No	Kebijakan	Program	Kegiatan	Target		Realisasi	
				Anggaran (Rp)	Kinerja (%)	Anggaran (Rp)	Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Utilitas Sekolah				
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.775.339.577	100	2.579.922.280	92,96
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	728.004.882	100	697.385.000	95,8
			Rehab Sedang/Berat laboratorium	1.230.520.238	100	556.378.000	45,2
			Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.633.208.367	100	2.525.969.767	95,9
			Pengadaan Mebel Sekolah	851.441.040	100	704.864.865	82,8
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	3.801.170.000	100	3.665.378.929	96,4
			Perlengkapan Belajar Peserta Didik	365.393.750	100	362.542.342	99,2
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.395.223.306	100	1.947.951.500	81,3
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	705.800.000	100	235.600.000	33,4
			Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	665.008.411	100	312.340.000	47
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2.912.727.738	100	2.178.255.514	74,8
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	9.088.530.000	100	8.559.453.033	94,2
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	329.601.365	100	294.360.120	89,3
			Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	65.300.000	100	-	-
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	433.571.873	100	368.633.000	85
			Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	299.624.178	100	135.081.400	45,1
			Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	728.004.882	100	697.385.000	95,8
4	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1.345.902.420	100	894.780.961	66,48
			Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	8.829.359.499	100	6.397.552.240	72,46

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong, 2024

4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan tahun 2024 yang terkait dengan pencapaian SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)

4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Pekerjaan Umum maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan penganggaran untuk jenis pelayanan :

1. Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari
 - Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari
 - Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan : Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan

Tabel 4.61 Realisasi Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari Tahun 2024

No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Capaian
1	2	3	4
1	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Griya Lestari	500.117.640	66 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 817 m
2	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Lanjutan Jln Tanjung Selatan Arah Tanta	639.544.376	Pipa HDPE 160mm (6") = 758 m Pipa HDPE 63mm (2") = 400 m
3	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi menuju Desa Bumi Makmur Kec. Bintang Ara	2.714.274.828	Pipa HDPE 160mm (6") = 3761 m Pipa HDPE 63mm (2") = 957 m
4	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Minum Perdesaan Desa Teratau Kec. Jaro	688.040.632	148 SR Pipa HDPE 63mm (2") = 4225 m

No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Capaian
1	2	3	4
5	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Minum Perdesaan Desa Garagata Kec. Jaro	424.342.240	145 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 274 m Pipa HDPE 63mm (2") = 1626 m
6	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Arah Desa Lok Batu	4.177.565.536	Pipa HDPE 160mm (6") = 2434 m Pipa HDPE 90mm (3") = 9210 m
7	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih SPAM Perdesaan Sei. Pimping Kec. Tanjung	1.198.766.828	Pipa HDPE 90mm (3") = 947 m Pipa HDPE 63mm (2") = 482 m
8	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Kecamatan Banua Lawas	2.714.274.828	Pipa HDPE 160mm (6") = 3282 m Pipa HDPE 63mm (2") = 4328 m
9	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi HDPE Desa Nawin - Bongkang Kec. Haruai (Lanjutan)	2.979.488.728	Pipa HDPE 160mm (6") = 2262 m Pipa HDPE 90mm (3") = 1936 m
10	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Arah Komplek Linda 11 dan Sekitarnya (SILPA Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahap II TA. 2023)	380.026.800	93 SR Pipa HDPE 32mm (1") = 50 m Pipa HDPE 90mm (3") = 413 m
11	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Desa Sungai Hanyar (DID Tahap II) (SILPA Dana Intensif Fiskal Kinerja Tahap II TA. 2023)	856.262.020	94 SR Pipa HDPE 90mm (3") = 2354 m
12	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi di Komplek Grand Permata Baru (SILPA Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahap II TA. 2023)	450.105.876	50 SR Pipa HDPE 63mm (2") = 893,6 m
13	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Jl. Pandan Arum 2 Kel. Belimbing Raya (DID Tahap II) (SILPA Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahap II TA. 2023)	519.819.244	Pipa HDPE 110mm (4") = 481 m Pipa HDPE 90mm (3") = 526 m Pipa HDPE 63 mm (2") = 661 m
14	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Sei Gampa Desa Banua Lawas (DID Tahap II) (SILPA Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahap II TA. 2023)	856.262.020	102 SR Pipa HDPE 63 mm (2") = 2686 m
15	Pengadaan dan Pemasangan Sarana Air Bersih SPAM Perdesaan Desa Wayau (DID Tahap II) (SILPA Dana Insentif Fiskal Kinerja Tahap II TA. 2023)	454.652.400	40 SR Pipa HDPE 63mm (2") = 306 m
16	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Desa Maburai Kec. Murung Pudak (Dana DAK)	3.300.000.000	356 SR Pipa HDPE 160mm (6") = 1271 m Pipa HDPE 110mm (4") = 742 m Pipa HDPE 63mm (2") = 3148 m
17	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Belimbing Raya Kec. Murung Pudak (Dana DAK)	3.550.000.000	411 SR Pipa HDPE 160mm (6") = 725 m Pipa HDPE 110mm (4") = 2055 m Pipa HDPE 63mm (2") = 2504 m
18	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Hikun Kec. Tanjung	3.100.000.000	310 SR Pipa HDPE 220mm (6") = 1068 m Pipa HDPE 110mm (4") = 2011 m

No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Capaian
1	2	3	4
	(Dana DAK)		Pipa HDPE 90mm (3") = 425 m Pipa HDPE 63mm (2") = 415 m
19	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak (Dana DAK)	2.100.000.000	255 SR Pipa HDPE 220mm (6") = 456 m Pipa HDPE 110mm (4") = 472 m Pipa HDPE 90mm (3") = 228 m Pipa HDPE 63mm (2") = 2649 m
20	Pemasangan SR di Wilayah Akses WTP Belimbing TA 2024	600.000.000	230 SR
21	Pemasangan SR di Wilayah Akses WTP Agung TA 2024	199.998.560	74 SR
22	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Distribusi Arah Kambitin (lanjutan)	2.077.687.987	Pipa HDPE 200mm (8") = 1252 m Pipa HDPE 110mm (4") = 1769 m Pipa HDPE 90mm (3") = 395 m

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

2. Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- Indikator : Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- Program : Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Kegiatan : Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALDS) Setempat
 - b. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Tabel 4.62 Realisasi Pelayanan Dasar Pengolahan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Output
1	2	3	4
1	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Garunggung Kec. Tanjung (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
2	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Habau Kec. Banua Lawas (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
3	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Murung Karang Kec. Muara Harus (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
4	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Palapi Kec. Muara Uya (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
5	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Pudak Setegal Kec. Kelua (Dana DAK)	540.000.000	50 unit

No	Paket Pekerjaan	Anggaran (Rp)	Output
1	2	3	4
6	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Purai Kec. Banua Lawas (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
7	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Santuun Kec. Muara Uya (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
8	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Sungai Buluh Kec. Kelua (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
9	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Desa Sungai Rukam II Kec. Pugaan (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
10	Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan Kelurahan Mabuun Kec. Murung Pudak (Dana DAK)	540.000.000	50 unit
11	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Pampanan Kec. Pugaan	193.926.000	15 unit
12	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Pugaan Kec. Pugaan	164.837.100	20 unit
13	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Kel. Pulau Kec. Kelua	164.837.100	15 unit
14	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Wilayah Kecamatan Tanjung	193.926.000	19 unit
15	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Pamarangan Kiwa Kec. Tanjung	193.926.000	16 unit
16	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual di Desa Tantaringin Kec. Muara Harus	193.926.000	19 unit

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong, 2024

4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.63 Program dan Kegiatan Penerapan SPM pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	407.448.000
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	2.107.650.000
2	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	19.992.725.540

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	8.541.796.000

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Tabalong, 2024

4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kegiatan :

- a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
 - 1) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
 - 2) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 4) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 1) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 2) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - 3) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup/Walikota

PROGRAM PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan :

- a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong, menjabarkan dan mengimplimentasikan kebijakan yang telah ditetapkan, dirumuskan program kerja sesuai prioritas sebagai berikut :

- a. Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pelayanan Kesiapsiagaan Terhadap bencana;
Kegiatan ini terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan sub kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
 - 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota;
Kegiatan ini terkait dengan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Informasi Rawan Bencana dengan sub kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana.

4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan tujuan pemenuhan kebutuhan dasar pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024 adalah :

Tabel 4.64 Program, Kegiatan, Target dan Capaian Sasaran Pemenuhan Kebutuhan Dasar

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Penerima Manfaat	Capaian Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6
1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	5.566.250.000,-	5.554.050.000,-		
	Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak terlantar	5.566.250.000,-	5.554.050.000,-	607 anak	607 anak
2	Program Penanganan Bencana	1.075.866.847,-	925.490.776,-,-		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	640.729.247,-	539.130.409,-	100 %	100 %
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten / Kota	435.137.600,-	386.360.367,-		

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Target Penerima Manfaat		Capaian Penerima Manfaat	
1	2	3	4	5		6	
3	Program Rehabilitasi Sosial	3.298.984.269,-	3.103.404.357,-				
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	3.298.984.269,-	3.103.404.357,-	Lanjut Usia Terlantar	694 orang	Lanjut Usia Terlantar	694 orang
Penyandang Disabil				95 orang	Penyandang Disabil	95 orang	
Penerima Alat bantu				1 orang	Penerima Alat bantu	1 orang	
Gelandangan dan Pengemis				22 orang	Gelandangan dan Pengemis	22 orang	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tabalong, 2024

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan data dan informasi yang disajikan pada BAB I, Kabupaten Tabalong telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan visi dan misi yang jelas, yaitu menuju masyarakat yang lebih agamais, sejahtera, dan mandiri, pemerintah daerah telah memprioritaskan lima bidang utama pembangunan: percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Alokasi anggaran yang signifikan untuk sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur mencerminkan upaya pemerintah dalam memastikan tercapainya standar pelayanan minimal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, Kabupaten Tabalong telah menerapkan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari peningkatan alokasi anggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perubahan RKPD (P-RKPD), yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung program-program prioritas. Pendekatan pembangunan berkelanjutan juga telah diintegrasikan dalam setiap program dan kegiatan, dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, Kabupaten Tabalong tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pembangunan yang inklusif dan berwawasan lingkungan.

Secara keseluruhan, upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menunjukkan hasil yang positif, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan pendapatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan komitmen yang konsisten dan kebijakan yang tepat, Kabupaten Tabalong memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi pembangunannya menjadi masyarakat yang agamais, sejahtera, dan mandiri.

Berdasarkan analisis capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong tahun 2024 yang disajikan pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat kemajuan yang signifikan dalam berbagai sektor pembangunan. Capaian kinerja makro menunjukkan peningkatan pada beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 75,97, serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, masih terdapat tantangan dalam beberapa aspek, seperti kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB yang belum mencapai target, serta pengelolaan lingkungan hidup yang memerlukan perhatian lebih.

Pada tingkat sektoral, capaian kinerja menunjukkan hasil yang memuaskan

dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dengan tingkat partisipasi pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan yang merata. Namun, beberapa sektor seperti pengelolaan sampah, penanganan kawasan kumuh, dan peningkatan investasi masih memerlukan upaya lebih intensif. Selain itu, efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran perlu ditingkatkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan jangka menengah.

Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten Tabalong telah berupaya maksimal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan, meskipun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Ke depan, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran yang lebih efektif untuk memastikan tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, Kabupaten Tabalong dapat terus meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya serta memperkuat fondasi pembangunan menuju kemandirian daerah yang lebih baik.

Berdasarkan pelaksanaan tugas pembantuan yang disajikan pada BAB III, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong melalui UPTD BLK Tanjung telah berhasil melaksanakan program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi dengan realisasi anggaran mencapai 95% dan capaian kegiatan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kompetensi pencari kerja di Kabupaten Tabalong. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan jumlah instruktur, kurangnya peralatan pelatihan, serta tidak adanya staf khusus yang menangani keuangan. Selain itu, tingginya minat peserta pelatihan yang tidak diimbangi dengan kapasitas fasilitas juga menjadi tantangan tersendiri.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penambahan instruktur, penyediaan alat pelatihan yang memadai, serta pertimbangan untuk menambah paket pelatihan guna menampung lebih banyak peserta. Dengan upaya ini, diharapkan pelaksanaan tugas pembantuan ke depan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi peningkatan kualitas tenaga kerja di Kabupaten Tabalong. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah juga perlu ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan program dan pencapaian tujuan pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yang disajikan dalam BAB IV, dapat disimpulkan bahwa upaya pencapaian SPM telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Pada bidang pendidikan, capaian indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan telah mendekati target 100%, dengan realisasi masing-masing sebesar 95,42%, 97,75%, dan 91,26%. Kemampuan literasi dan numerasi siswa juga menunjukkan peningkatan, meskipun masih perlu ditingkatkan terutama pada tingkat sekolah dasar. Di sisi lain, proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B dan kualifikasi pendidik PAUD dengan S1/D4 masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target yang diharapkan.

Pada bidang kesehatan, capaian pelayanan dasar seperti kesehatan ibu hamil, bayi baru lahir, dan balita telah mencapai target 100% atau mendekatinya. Namun, pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa berat, terduga

tuberkulosis, dan risiko terinfeksi HIV masih memerlukan perhatian lebih, dengan capaian di bawah 70%. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan optimalisasi pelaporan dari fasilitas kesehatan swasta.

Dalam bidang pekerjaan umum, pelayanan penyediaan air minum dan pengolahan air limbah domestik telah mencapai capaian masing-masing sebesar 85,36% dan 95,05%. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi tantangan utama dalam memenuhi target 100%. Sementara itu, pada bidang perumahan rakyat, program rehabilitasi dan pembangunan rumah bagi korban bencana serta fasilitasi rumah layak huni telah berjalan sesuai target, meskipun masih terdapat kekurangan dalam realisasi jumlah unit yang dibangun.

Di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta penegakan hukum telah mencapai target 100%. Namun, keterbatasan sarana prasarana dan personel menjadi kendala yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pada bidang sosial, program rehabilitasi sosial dan perlindungan korban bencana telah berjalan dengan baik, dengan capaian 100% untuk layanan dasar seperti penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis.

Secara keseluruhan, upaya pencapaian SPM di Kabupaten Tabalong telah menunjukkan kemajuan yang positif, namun masih diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti peningkatan kualitas data, optimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antar sektor. Dengan demikian, diharapkan pada tahun-tahun mendatang, Kabupaten Tabalong dapat mencapai target SPM secara menyeluruh dan memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada seluruh masyarakat.

Berdasarkan evaluasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Tabalong telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian kinerja pembangunan, baik pada tingkat makro maupun sektoral, menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun, tantangan seperti ketimpangan pendapatan, pengelolaan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia masih perlu menjadi perhatian utama.

Pelaksanaan tugas pembantuan melalui program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kompetensi oleh UPTD BLK Tanjung juga telah memberikan dampak positif, meskipun masih dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan instruktur, peralatan, dan kapasitas fasilitas. Upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti penambahan instruktur dan penyediaan alat pelatihan yang memadai, perlu segera diimplementasikan guna memastikan keberlanjutan program dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Secara keseluruhan, upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memberikan hasil yang positif, namun masih diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan komitmen yang konsisten, kebijakan yang tepat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan anggaran yang efektif, Kabupaten Tabalong memiliki potensi besar untuk mewujudkan visi pembangunannya menjadi masyarakat yang agamis, sejahtera, dan mandiri. Ke depan, langkah-langkah strategis dan kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

**PELAPORAN IKK 2024
KABUPATEN TABALONG**

Tanggal Cetak 18-03-2025 14:13

No. IKK	Kategori Urusan	Urusan	IKK Output	IKK Outcome	Rumus	Capaian	Keterangan	PEMDA		APIP		
								File Bukti	Diperbarui	Status	Keterangan	Diperbarui
1.a.1	Urusan Pemerintahan Wajib	Pendidikan	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau	95,420832		Ada	2025-01-30	OK	Sesuai dengan data dukung	2025-02-02
1.a.2	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 29467. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 29164	101,03895		Ada	2025-01-30 13:25:29	OK	Sesuai dengan data dukung	2025-02-02 19:44:57
1.a.3	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pendidikan	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi 2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah 4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan 5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan 6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar 7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar 9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama 10. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar 11. jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama 12. jumlah tenaga kependidikan pada jenjang	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 13363. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 14650	91,215017		Ada	2025-01-30 13:29:10	OK	sesuai dengan data dukung	2025-02-02 19:47:24

1.c.8.1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</p> <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</p> <p>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p> <p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi</p>	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<p>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 220. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 266</p>	82,706767	Ada	2025-02-06 07:01:49	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-02-06 16:28:38
1.c.8.2	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<p>1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota</p> <p>2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota</p> <p>3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota</p> <p>4. Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir</p> <p>5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota</p> <p>6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN</p> <p>7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya</p> <p>8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi</p>	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<p>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 133. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 133</p>	100	Ada	2025-01-31 13:26:48	OK	Sudah sesuai dengan data dukung	2025-02-03 02:25:07
1.d.1	Usuran Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	<p>1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya</p> <p>2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam</p> <p>3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam</p> <p>4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi</p> <p>6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi</p> <p>7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana</p> <p>8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi</p> <p>9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan</p>	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	<p>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 54. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 54</p>	100	Ada	2025-01-26 18:12:52	OK	Sudah sesuai data dukung	2025-01-29 12:05:25

1.e.4	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>1. Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal</p> <p>3. Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>4. Persentase warga negara yang ikut pelatihan</p> <p>5. Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana</p> <p>6. Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan</p>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 265820. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 265820	100	Ada	2025-01-23 07:29:01	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung telah sesuai	2025-01-29 18:41:03
1.e.5	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>1. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB</p> <p>2. Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana</p> <p>3. Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana</p> <p>4. Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana</p>	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 150. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 150	100	Ada	2025-02-03 12:19:33	OK	Telah diverifikasi dan sesuai data dukung	2025-02-03 13:25:58
1.e.6	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	<p>1. Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota</p> <p>2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan</p> <p>3. Tersedianya aparaturnya selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan</p> <p>4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa</p> <p>5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi</p> <p>6. Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran</p> <p>7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran</p>	<p>&nbsp;</p> <p>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 54	100	Ada	2025-03-04 12:13:50	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-01-30 08:38:29
1.e.7	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar	Ketentraman, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, persiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	12,44	Ada	2025-03-04 12:14:22	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung telah sesuai	2025-01-29 18:41:58

2.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pemberdayaan masyarakat dan desa	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa 2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya 3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan 4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan 	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 5	20	Ada	2025-01-22 09:41:01	OK	Sesuai Dengan Bukti dukung	2025-01-22 14:52:13
2.m.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di Perdakan 2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun 3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE) 5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK 	TFR (Angka Kelahiran Total)		308,3	Ada	2025-01-21 09:35:54	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-01-30 09:42:37
2.m.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP 2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Pemerintah Daerah kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif 4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan 	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 37619. Jumlah Pasangan Usia Subur = 47257	79,605138	Ada	2025-01-21 09:36:57	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-01-30 09:48:37
2.m.3	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah 2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 2265. Jumlah Pasangan Usia Subur = 47257	4,7929407	Ada	2025-01-21 09:37:54	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-01-30 10:02:35
2.n.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perhubungan	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C 2. Terlaksananya pelayanan uji berkala 3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi 4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota 	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,857	Ada	2025-01-20 07:36:37	OK	Sudah sesuai data dukung	2025-01-29 13:16:09

2.u	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) 2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman) 3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, mdan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) 4. Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola) 5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan) 6. Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran) 7. Layanan perijzinan membawa cagar budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data 8. Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi) 9. Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam kelembagaan sosial, keadilidikan, dan 	Terlestarikannya Cagar Budaya 	Jumlah cagar budaya yang diestarikan = 10. Jumlah cagar budaya yang terdata = 10	100	Ada	2025-01-20 12:16:27	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung telah sesuai	2025-01-29 19:09:40
2.v.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk 2. Persentase keterampilan memanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat 3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk 4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan 5. Jumlah pemasyarakatangemar membaca di masyarakat 	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		67,04	Ada	2025-02-12 11:33:49	OK	Sesuai data dukung	2025-02-12 15:29:44
2.v.2	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Perpustakaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya 2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa 3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) 	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		87,66	Ada	2025-02-12 11:34:14	OK	sesuai data dukung	2025-02-12 15:53:40
2.w.1	Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar	Kearsipan	<ol style="list-style-type: none"> 1. persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 2. persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip 3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN 	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)		100	Ada	2025-01-26 18:00:15	OK	sesuai data dukung	2025-02-02 20:13:01

3.b.2	Urusan Pilihan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p>	<p>Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 10707. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 857449</p>	1,248704	Ada	2025-03-15 19:23:02	OK	Data dukung telah sesuai	2025-03-18 14:12:04
3.b.3	Urusan Pilihan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p>	<p>Tingkat hunian akomodasi &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Jumlah kamar yang terjual = 45136. Jumlah kamar yang tersedia = 155490</p>	29,028233	Ada	2025-01-31 11:26:46	OK	Data dukung telah sesuai	2025-01-29 20:28:02
3.b.4	Urusan Pilihan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat <p>&nbsp;</p>	<p>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>	<p>Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 464.92. Total PDRB Berlaku = 32643.48</p>	1,4242354	Ada	2025-03-06 09:10:06	OK	telah diverifikasi dan sesuai dengan bukti dukung	2025-02-05 09:50:33

3.b.5	Urusan Pilihan	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi 2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata 3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota 4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan 5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri 6. Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota 7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri 8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi 9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan 10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat 	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 25,153243 22621943848. Total realisasi PAD = 89936490350	Ada	2025-02-06 13:15:34	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-02-06 13:36:21
3.c.1	Urusan Pilihan	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana pertanian yang diberikan 2. Prasarana pertanian yang digunakan 3. Penerbitan izin usaha pertanian 4. Persentase prasarana yang digunakan 5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota 	Produktivitas pertanian per hektar per tahunProduktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 55884. luas panen = 11132	Ada	2025-01-30 11:11:18	OK	Telah diverifikasi, data dukung sesuai	2025-01-31 07:23:25
3.c.2	Urusan Pilihan	Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana 	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menularPersentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 45. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 154	Ada	2025-01-20 12:24:56	OK	Telah diverifikasi dan bukti dukung sesuai	2025-01-22 08:18:27
3.d	Urusan Pilihan	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA 		100	Ada	2025-01-23 07:17:26	OK	Telah diverifikasi, Data Dukung Sesuai	2025-01-30 07:13:41
3.e	Urusan Pilihan	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota 	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota , 	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	Ada	2025-01-23 07:22:34	OK	Telah diverifikasi dan sesuai bukti dukung	2025-01-31 08:55:36



PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG